

Majalah



# PARLEMENTARIA

## Menabuh Tabuik Menyatukan Dunia Islam



EDISI 245  
TH. 2025



**PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom., M.A. (Kasubag Analis Media)

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**

Muhammad Husen, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Agung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Darmawan

**PENERBITAN****PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

M. Chairudin, S.Sos, M.M. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIKULASI**

Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI****STAF DISTRIBUSI DAN SIKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

**LAPORAN UTAMA**

4

4

**PROLOG**

Menabuh Tabuik, Menyatukan Dunia Islam

6

**LAPORAN UTAMA**

- Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan Dunia Islam
- Kemerdekaan Palestina, Api Perjuangan yang Terus Menyala
- Deklarasi Jakarta Kukuhkan Kepemimpinan DPR RI

16

**SUMBANG SARAN**

Jakarta Jadi Panggung Perjuangan Bela Palestina

18

**PENGAWASAN**

Kasus Asusila Dokter Guncang Kepercayaan Publik

20

**ANGGARAN**

Menguatkan Pusat Logistik Berikat

22

**LEGISLASI**Revisi UU PPMI  
Melindungi PMI dari Hulu ke Hilir

24

**FOTO BERITA**

28

**PROFIL**Rycko Menoza  
Jejak Langkah Sang Putra Lampung



PENGAWASAN



18

**Kasus Asusila  
Dokter Guncang  
Kepercayaan Publik**

ANGGARAN



20

**Menguatkan  
Pusat Logistik  
Berikat**

SOROTAN



58

**Mencari Solusi Kisruh  
Penerimaan Mahasiswa Baru**

- 32 KUNKER**
- 58 SOROTAN**  
Derita Para Pemain Sirkus
- 60 LIPUTAN KHUSUS**  
Menyatukan Visi, Membela Palestina
- 62 DAPIL**
- 70 PERNIK**  
Menuju Kantor Berita
- 72 KIAMAT SEHAT**  
*The Silent Killer* Hipertensi
- 74 WISATA**  
Menyapa Manado  
Menyerap Rasa dan Alam
- 76 LEMSA PARLE**  
Enam Tuntutan di aAri Buruh

SCAN QR  
UNTUK BERITA TERKINI  
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



DPR RI



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri

www.dpr.go.id

# Menabuh Tabuik, Menyatukan Dunia Islam





**Tabuhan gendang ‘Tabuik’ menggema dari Ruang Paripurna DPR RI, mengantar semangat yang lebih dalam dari seremoni belaka. Di tengah lantunan suara budaya Minangkabau itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Presiden Parlemen Pantai Gading Adama Bictogo berdiri sejajar, menandai dimulainya Inaugural Conference Session of The 19th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta.**



**NAMUN**, bukan hanya ritus pembukaan yang menyedot perhatian. Di hadapan 38 negara anggota PUIC, Presiden Prabowo

menyuarakan sesuatu yang lebih fundamental: seruan untuk bertindak. Tidak lagi sekadar menyusun resolusi, tetapi bergerak nyata — membela Palestina, memberantas kemiskinan, membangun institusi yang kuat, dan mempersatukan dunia Islam di tengah derasnya tantangan global.

Menyitir Muhammad AL-Fatih sebagai teladan kepemimpinan visioner umat, Prabowo menggarisbawahi pentingnya iman, ilmu, dan tata kelola yang bersih sebagai fondasi kebangkitan Islam. Tema besar konferensi, *Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience*, menjadi relevan ketika dunia Islam dihadapkan pada krisis multidimensi—dari kelaparan dan korupsi, hingga ketimpangan pendidikan dan kemerosotan solidaritas.

Dengan gaya retorika yang lugas dan patriotik, Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan yang tak sekadar diplomatik: menjadikan kekuatan Islam sebagai rahmat,

“

**Kesetaraan gender bukanlah semata tuntutan modernitas, tetapi bagian dari semangat Islam yang mendorong kemajuan. Kehadirannya sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia menjadi simbol nyata.**

bukan dominasi. Sebuah refleksi mendalam yang menjadikan forum PUIC bukan sekadar arena konferensi, melainkan mimbar peradaban.

Tak hanya dari eksekutif, suara parlemen Indonesia pun menggaung lantang melalui pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam nada yang tegas namun penuh empati, Puan menyerukan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun dunia Islam yang

berdaya dan berdaulat. Ia menyebut pendidikan bukan hanya alat peningkatan kualitas manusia, tetapi juga benteng bagi ketahanan budaya dan identitas umat.

Puan juga menggarisbawahi peran strategis perempuan dalam proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah semata tuntutan modernitas, tetapi bagian dari semangat Islam yang mendorong kemajuan. Kehadirannya sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia menjadi simbol nyata bahwa perempuan bisa dan harus mengambil bagian dalam kepemimpinan dunia Islam.

Dalam konteks global, Puan menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya islamofobia dan intoleransi, sekaligus menolak keras segala bentuk relokasi terhadap rakyat Palestina. “Gaza adalah milik rakyat Palestina,” tegasnya, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para delegasi. Pernyataan itu mempertegas posisi Indonesia di tengah arus politik global yang sering mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina pun diwujudkan dalam Jakarta *Declaration*, sebuah dokumen hasil konferensi yang disahkan dengan Puan Maharani sebagai pemimpin sidang. Deklarasi itu menyerukan penghentian agresi Israel, penolakan terhadap relokasi warga Palestina, dan seruan sanksi internasional bagi pelanggaran kemanusiaan di Gaza.

Dengan kepemimpinan eksekutif yang kuat dan dukungan parlemen yang solid, Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta bukan sekadar ajang diplomasi, melainkan momentum strategis dalam sejarah dunia Islam. Sebuah panggilan untuk bersatu, bangkit, dan mengambil peran sebagai penjaga keadilan, peradaban, dan perdamaian dunia. 🌿



FOTO: MUNCHEV/VEL

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan sambutan dalam upacara transisi presidensi (*Transition Ceremony of Presidency*), dalam ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

# Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan Dunia Islam

Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, mulai 12 Mei menjadi pusat perhatian dunia Islam. Indonesia, melalui DPR RI, secara resmi menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Konferensi ini tidak sekadar menjadi ajang diplomatik, tetapi juga menandai peringatan 25 tahun berdirinya PUIC, sebuah momentum penting yang menegaskan peran Indonesia dalam kancah politik global Islam.



**KETUA** DPR RI Puan Maharani, menyebut penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta sebagai kehormatan sekaligus

tantangan untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. "Menjadi tuan rumah PUIC 2025 bukan hanya soal menjadi penyelenggara, tetapi tentang kepemimpinan moral



dan politik luar negeri. Indonesia siap menjadi jembatan dialog dan kolaborasi antarpemerintah dunia Islam,” ujar Puan kepada Parlemen, sehari sebelum pelaksanaan PUIC.

“

**DPR RI ingin mengarahkan diskusi pada solusi konkret atas tantangan multidimensi yang dihadapi dunia Islam**

**Puan Maharani**  
Ketua DPR RI

Konferensi ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari 57 negara anggota OKI serta sejumlah negara peninjau (observer), termasuk 11 ketua parlemen dan 8 wakil ketua parlemen. Kehadiran para tokoh parlemen dari Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa menegaskan posisi strategis Indonesia dalam memperkuat diplomasi parlemen berbasis solusi.

### **Ketahanan Negara-negara Islam**

Dengan mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, PUIC ke-19 ingin menegaskan bahwa ketahanan negara-negara Islam hanya dapat dibangun melalui institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel.

“DPR RI ingin mengarahkan diskusi pada solusi konkret atas tantangan multidimensi yang dihadapi dunia Islam—mulai dari konflik, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina,” kata Puan.

Menurut data dari UNDP *Human Development Report* 2024, lebih dari 70 persen negara-negara anggota OKI masuk dalam kategori menengah ke bawah dalam Indeks Pembangunan Manusia. Banyak di antaranya menghadapi konflik berkepanjangan dan krisis kelembagaan. Dalam konteks ini, PUIC menjadi wadah strategis untuk membangun solidaritas dan kerja sama antarpemerintah guna mendorong pembangunan berkelanjutan.



FOTO: JAKA/VEL

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri jamuan makan malam yang digelar untuk delegasi Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (11/5/2025).

## Spirit KAA 1955

Istimewanya, PUIC ke-19 ini berlangsung berdekatan dengan peringatan berdekatan dengan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar di Bandung pada 18 April lalu. Puan menekankan bahwa semangat Bandung—yakni solidaritas global Selatan-Selatan—masih relevan dan harus dihidupkan kembali di era geopolitik yang makin kompleks. "Spirit Bandung tidak berhenti di tahun 1955. Tahun 2025 adalah saat yang tepat untuk menghidupkan kembali semangat solidaritas global dan PUIC adalah panggung strategis untuk itu," tutur Puan.

Sejalan dengan semangat ini, DPR RI menggelar rangkaian acara pendukung, termasuk jamuan makan malam di Museum Nasional pada Minggu malam (11/5) lalu, yang diprakarsai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI 2019–2024 Fadli Zon. Acara tersebut tidak hanya menunjukkan keramah-tamahan Indonesia, tetapi

“

**Tahun 2025 adalah saat yang tepat untuk menghidupkan kembali semangat solidaritas global dan PUIC adalah panggung strategis untuk itu.**

**Puan Maharani**  
Ketua DPR RI

juga memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya kepada para delegasi asing.

Puan hadir bersama sejumlah tokoh, seperti Sekjen PUIC



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam pidato pada *Inaugural Session of The 19th Session of The PUIC Conference* yang digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Mouhamed Khouraiichi Niass, Wamen Kebudayaan Giring Ganesha, dan para pimpinan BKSAP. Delegasi juga diajak berkeliling Museum Nasional sebagai bagian dari pertukaran budaya yang menjadi fondasi penting dalam diplomasi antarbangsa.

## Dukungan untuk Palestina

Di antara isu krusial yang menjadi sorotan dalam sidang PUIC adalah perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Gaza dan Tepi Barat semakin memburuk. Laporan UN OCHA pada April 2025 mencatat lebih dari 30 ribu

korban jiwa sejak pecahnya eskalasi terbaru akhir tahun lalu.

"DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, dan perdamaian regional harus menjadi pembahasan prioritas," kata Puan. Indonesia sendiri konsisten menjadi pendukung hak-hak Palestina di berbagai forum internasional, termasuk di Majelis Umum PBB. Dalam konteks PUIC, DPR RI mendorong lahirnya resolusi yang mengikat secara moral untuk memperkuat tekanan terhadap Israel dan mendukung solusi dua negara.

ssh/mh



# Kemerdekaan Palestina, Api Perjuangan yang Terus Menyala

DPR RI mencatat sejarah penting dengan menjadi tuan rumah dan pemegang keketuaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-negara OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025.



**FORUM** yang dihadiri lebih dari 400 delegasi dari 38 negara ini memperkuat peran Indonesia dalam memperjuangkan

isu-isu utama umat Islam dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pilar ketahanan global.

Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina menjadi benang merah dalam hampir seluruh sesi konferensi. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menyatakan, "Indonesia sejak awal telah konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada alasan untuk mundur dari perjuangan ini."

Dalam *13th Meeting of the Permanent Committee on Palestine*,

para delegasi menyuarakan kebutuhan mendesak akan resolusi bersama yang dapat diterima secara luas di forum internasional. Jakarta Declaration menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah prioritas bersama negara-negara Islam.

Husein menambahkan bahwa kekuatan simbolik forum PUIC harus diubah menjadi kekuatan politik nyata. "Kita perlu strategi agar dunia luar OKI juga mendukung perjuangan



FOTO: MUNICH/VEL

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, dalam sesi pleno Konferensi ke-19 PUIC, Rabu (15/5).



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri di sela-sela 19th Session of the PUIC Conference di Gedung Nusantara, Rabu (14/5/2025).

ini. Ini bukan hanya isu muslim, ini isu kemanusiaan," ujarnya.

## Isu Minoritas Muslim Global

Isu diskriminasi terhadap komunitas muslim minoritas juga menjadi perhatian utama. Dalam *4th Meeting of the Committee of Muslim Communities and Minorities*, delegasi Indonesia mengusulkan pembentukan komite khusus untuk menangani persoalan minoritas muslim global.

"Kita tidak bisa hanya andalkan organisasi internasional. Diplomasi bilateral justru bisa lebih kuat dampaknya," kata Husein, seraya mengungkapkan rencana kunjungan solidaritas DPR RI ke Myanmar untuk melihat langsung kondisi Rohingya.

Senada, Irine Yusiana Roba Putri menekankan pentingnya negara-negara OKI satu suara dalam melawan diskriminasi dan islamofobia. "Kita ingin suara OKI terdengar lebih lantang dan

berpengaruh di dunia internasional. Ini soal keadilan," ujar Wakil Ketua BKSAP tersebut.

Keketuaan DPR RI di PUIC disebut sebagai tonggak penting yang memungkinkan Indonesia menjadi

pengarah langkah penyelesaian konflik di dunia Islam. "Posisi ini bukan hanya prestise, tapi peluang besar untuk menjadi jembatan perdamaian," jelas Irine.

Konferensi ke-19 PUIC menghasilkan Deklarasi Jakarta yang berisi 17 resolusi mencakup isu Palestina, perlindungan minoritas, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, hingga konservasi lingkungan. Salah satu poin penting deklarasi adalah penegasan prinsip good governance dan penguatan institusi sebagai fondasi negara-negara OKI menghadapi tantangan global.

Ravindra Airlangga, Wakil Ketua BKSAP lainnya, menyampaikan bahwa Indonesia aktif dalam semua komite. "Kita ingin mendorong kolaborasi konkret: dari ekonomi hijau, konservasi air, sampai inkubator startup bagi generasi muda," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya burden sharing dalam isu pengungsi. "Negara-negara transit menanggung beban besar. OKI dan ASEAN harus saling bantu," tambah Ravindra.

ssh/mh



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, dalam Sidang Komite Tetap Ekonomi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC), Senin (12/5/2025).



# Deklarasi Jakarta Kukuhkan Kepemimpinan DPR RI

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menjadi saksi sejarah diselenggarakannya *The 19th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)* pada 12–15 Mei 2025. Mengusung tema *Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience*. Konferensi ke-19 PUIC bukan hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga menegaskan peran DPR RI dalam memimpin konsolidasi dunia Islam melalui diplomasi parlemen.



**KETUA** Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyebut forum ini sebagai momentum emas

kemerdekaan Palestina, perlawanan terhadap Islamofobia, konflik di Kashmir, dan perlakuan

memperkuat solidaritas umat dan menyuarakan keadilan, khususnya bagi rakyat Palestina. Ditegaskan Mardani, sidang PUIC bukanlah sekadar forum seremonial, tetapi sarana nyata perjuangan kemanusiaan dan diplomasi global dunia Islam.

PUIC ke-19 dihadiri 38 negara anggota OKI dan 9 organisasi internasional. Ada 456 peserta dari 54 negara yang hadir. Acara dibuka Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, yang menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya kepemimpinan berkeadilan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum ini, diantaranya perjuangan

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, saat memimpin 19th Session of the PUIC Conference di Gedung Nusantara II.



Foto: Jaka/vel



FOTO: TIM/VEL

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Presiden Parlemen Pantai Gading Adama Bictogo menabuh gendang 'Tabuik' menandakan dibukanya secara resmi *Inaugural Conference Session of The 19th Session of The PUIC*, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

terhadap minoritas muslim di berbagai negara. Sidang PUIC juga menghasilkan *Jakarta Declaration*, sebuah dokumen komprehensif berisi 17 poin rekomendasi dan seruan tindakan nyata antarpemerintah OKI.

Dalam deklarasi tersebut, isu Palestina ditegaskan sebagai jantung perjuangan umat Islam. Forum ini menyerukan penghentian agresi Israel, pembebasan tahanan Palestina, dan mendukung penuh solusi dua negara melalui forum internasional di PBB pada Juni 2025. Forum juga mengecam keras segala bentuk relokasi paksa dan rencana aneksasi oleh Israel.

Selain itu, PUIC menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi demokratis di negara-negara Islam

“

**Forum ini menyerukan penghentian agresi Israel, pembebasan tahanan Palestina, dan mendukung penuh solusi dua negara melalui forum internasional di PBB pada Juni 2025.**

**Mardani Ali Sera**  
Ketua BKSAP DPR RI

sebagai pilar utama membangun ketahanan kolektif. "PR-nya ada di kita. Kita perlu reformasi internal, pemerintahan yang bersih, institusi yang kuat, baru bisa bantu saudara kita di Palestina," tegas Mardani.

Beberapa resolusi penting turut dihasilkan dari enam *standing committee* yang membahas isu politik luar negeri, pemuda dan perempuan, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan minoritas muslim. Komite Politik, yang dipimpin langsung oleh Mardani, menyusun *roadmap* diplomasi untuk menyikapi berbagai konflik internasional dengan pendekatan damai dan bermartabat.

Forum juga menyepakati pentingnya pembentukan *PUIC Programme of Actions*, peningkatan kerja sama dengan parlemen global



seperti parlemen Eropa dan kongres AS, serta pemanfaatan teknologi digital dan ekonomi intra-OIC sebagai bagian dari agenda pembangunan umat. Puncaknya, penutupan konferensi pada 15 Mei 2025 ditandai dengan pembacaan Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta sebuah deklarasi komprehensif berisi 17 butir keputusan yang dibacakan langsung oleh Ketua BKSAP Mardani Ali Sera disaksikan seluruh delegasi.

Mardani menegaskan bahwa deklarasi ini bukan hanya pernyataan normatif, tetapi komitmen nyata menuju aksi kolektif. "Kami ingin memastikan bahwa diplomasi parlemen benar-benar

“

**Deklarasi ini menjadi pijakan strategis sekaligus panggilan moral dunia Islam untuk bersatu, membangun ketahanan, dan berjuang untuk keadilan global**

**Puan Maharani**  
Ketua DPR RI

menjadi garda depan perjuangan rakyat, khususnya Palestina, dan pembangunan umat Islam yang berdaulat," tegasnya.

"Deklarasi ini menjadi pijakan strategis sekaligus panggilan moral dunia Islam untuk bersatu, membangun ketahanan, dan berjuang untuk keadilan global," pungkasnya menutup sidang. Dengan suksesnya penyelenggaraan ini, Indonesia tidak hanya menegaskan komitmennya sebagai jembatan perdamaian dan solidaritas dunia Islam, tetapi juga meneguhkan posisi DPR RI sebagai pelopor diplomasi parlemen yang proaktif dan solutif di tataran global.  pun/mh



# Sejarah PUIC

(Uni Parlemen Negara Anggota OKI)

## LATAR BELAKANG

**Organisasi Konferensi Islam (OKI) dibentuk tahun 1969** untuk memperkuat solidaritas antarnegara-negara Islam. Untuk memperluas kerja sama di bidang parlemen, **dibentuklah PUIC.**

## PEMBENTUKAN PUIC

Inisiatif pembentukan muncul pada Konferensi Parlemen Islam pertama di Teheran, Iran (1999).

**Didirikan secara resmi:  
17 Juni 1999 di Teheran, Iran.**

## TUJUAN PUIC

1. Meningkatkan kerja sama antarpemerintahan negara anggota OKI.
2. Mendukung perjuangan negara-negara Islam, termasuk Palestina.
3. Mendorong harmonisasi undang-undang dan kebijakan antarnegara anggota.

## KEANGGOTAAN

Anggota:  
**54 negara (semua anggota OKI).**  
Terdiri dari parlemen negara-negara Islam dari Afrika, Asia, dan Timur Tengah.

## PERAN STRATEGIS

1. Wadah diplomasi parlementer antarnegara Islam.
2. Menjembatani isu-isu sensitif di dunia Islam secara kolektif.

## KONFERENSI PUIC KE-19 JAKARTA

Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus menerima estafet kepemimpinan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dari Pantai Gading.

## DEKLARASI JAKARTA

- Deklarasi Jakarta menjadi blueprint transformasi peran parlemen Islam di era krisis global.
- Mengedepankan nilai ukhuwah, transparansi, dan keadilan.
- PUIC menyerukan solidaritas nyata menuju masa depan yang berdaulat dan bermartabat.

## FOKUS ISU INDONESIA DALAM KEPRESIDENAN PUIC

1. Dukungan Penyelesaian Konflik Palestina
2. Dorong Komunitas Internasional Tingkatkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Palestina
3. Membentuk Aliansi Strategis Ciptakan Landasan Reformasi Institusi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kuat di masing-masing negara OKI
4. Perkuat solidaritas dan kesatuan ummah serta memperluas kerja sama nyata antarnegara OKI



# Peta Isu Utama



## 01 Palestina di Pusat Perhatian.

Menuntut penghentian agresi Israel di Gaza.  
Dukungan penuh pada solusi dua negara.  
Ajakan aksi diplomatik global untuk sanksi Israel.

## 02 Islamofobia & Intoleransi Global.

1. Penolakan terhadap diskriminasi, kebijakan rasis, dan ujaran kebencian.
2. Promosi dialog antaragama dan antarbudaya melalui parlemen.

## 03 Reformasi PUIC

1. Penguatan mandat PUIC.
2. Penyusunan Program Aksi PUIC.
3. Peningkatan inklusivitas dan efisiensi organisasi.

## REKOMENDASI STRATEGIS

01

Reformasi dan Tata Kelola

- Legislasi untuk akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.
- Peningkatan layanan publik melalui pengawasan parlemen

02

Kerja Sama Global dan Regional

- Kolaborasi antarpemerintah (Eropa, AS, OIC).
- Dialog reguler dan pertukaran pengalaman.

03

Transformasi Digital Islam

- Infrastruktur digital nasional dan inklusi digital.
- Keamanan siber & pemberantasan disinformasi.

## AKSI UNTUK MASA DEPAN ISLAM

1. Investasi Prioritas.
2. Pendidikan & riset.
3. Pemberdayaan perempuan dan pemuda.
4. Perdagangan intra-OIC dengan mata uang lokal.
5. Teknologi dan lembaga berbasis pengetahuan.





Oleh:  
**Trubus Rahadiansyah**  
Pakar Kebijakan Publik,  
Universitas Trisakti

# Jakarta Jadi Panggung Perjuangan Bela Palestina

**S**ebagai negara dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia sejak awal berdirinya konsisten berada di garis depan

membela Palestina. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran ini semakin ditegaskan dan diperluas jangkauannya, terutama melalui diplomasi yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sidang Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta tahun ini merupakan penegasan kembali komitmen Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina. Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin akut di Gaza, Indonesia menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan hanya wacana moral, tetapi juga agenda konkret dalam diplomasi internasional.







Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan pembelaan terhadap Palestina dalam berbagai forum global, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI, *World Economic Forum*, dan sidang-sidang internasional lainnya. Dalam setiap pidatonya, Presiden Prabowo selalu menegaskan bahwa Indonesia berdiri tegak bersama rakyat Palestina, menolak pendudukan ilegal, dan menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

Diplomasi Prabowo tidak hanya terbatas pada pernyataan simbolik, melainkan diiringi dengan langkah konkret, seperti penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza, penguatan kerja sama multilateral di kawasan Timur Tengah, serta mendorong negara-negara besar untuk bersikap lebih tegas dalam mendesak penghentian agresi Israel. Komitmen ini memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan moral dalam tatanan global yang tengah mencari arah baru dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

Sidang PUIC di Jakarta menjadi wadah strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyatukan kembali kekuatan dunia Islam dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Parlemen dari negara-negara anggota OKI memegang peran penting dalam mendorong kebijakan luar negeri masing-masing agar lebih tegas, solid, dan bersinergi dalam membentuk tekanan internasional terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

Dalam forum ini, DPR RI bukan hanya bertindak sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai motor penggerak agenda diplomasi kemerdekaan Palestina di tingkat parlemen dunia Islam. Langkah DPR ini sejalan dengan diplomasi Presiden Prabowo yang menempatkan perjuangan Palestina sebagai bagian dari strategi politik luar negeri Indonesia yang berbasis pada keadilan, kemanusiaan, dan prinsip kedaulatan bangsa.

Tentu saja, perjuangan ini tidak cukup hanya di tataran pemerintah. Masyarakat sipil

Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga kesadaran kolektif dan mengawal agenda ini secara berkelanjutan. Kampus, media, komunitas agama, serta organisasi kemanusiaan perlu terus membangun solidaritas global untuk Palestina melalui advokasi, edukasi publik, serta penggalangan bantuan kemanusiaan.

Sebagai pengamat kebijakan publik, saya melihat bahwa sinergi antara diplomasi presiden, peran parlemen, dan partisipasi publik menjadi kekuatan utama Indonesia dalam mendorong lahirnya solusi damai dan adil bagi Palestina. Melalui forum PUIC, kita berharap lahir deklarasi bersama yang kuat, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam bentuk kebijakan nyata dan langkah kolektif.

Dari Jakarta, semoga mengalir arus solidaritas yang lebih kuat, menyatukan suara dunia Islam untuk mengakhiri penjajahan dan membuka jalan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan diakui sepenuhnya oleh komunitas internasional. 🕊️

# Kasus Asusila Dokter Guncang Kepercayaan Publik

**Betapa rapuhnya penegakan sekaligus pengawasan mutu dan profesionalisme di sektor kesehatan. Terbukti, pada awal tahun 2025, kasus per kasus kekerasan seksual yang melibatkan tenaga kesehatan berentetan terkuak. DPR RI, secara tegas, menyatakan tidak ada toleransi terhadap praktik kejahatan seksual di manapun.**



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene.

**B**erdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2024, kekerasan seksual di ranah publik menempati jumlah tertinggi hingga mencapai 1.830 kasus. Sektor kesehatan pun tidak luput dari kriminalitas ini. Terbukti, sepanjang Maret-April 2025, empat kasus kekerasan seksual di

rumah sakit kembali terjadi secara berentetan.

Di antaranya, kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) bernama Priguna Anugerah Pratama (31 tahun) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan kasus dugaan pelecehan seksual dokter

kandungan bernama Muhammad Syafril Firdaus (33 tahun) di Garut.

Lalu, kasus tindak pidana asusila yang diduga dilakukan dokter PPDS Universitas Indonesia (UI) Muhammad Azwindar Eka Satria i kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter dengan inisial AYP di Persada Hospital Malang.

Jalur hukum didesak untuk ditempuh secara serius tanpa toleransi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan tindakan asusila yang dilakukan para pelaku sama sekali tidak mencerminkan etika seorang dokter, tapi justru seperti penjahat.

“

**Dokter adalah tumpuan rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Ia mengingatkan para dokter seharusnya memegang teguh sumpah yang diucapkan**

**Nihayatul Wafiroh**  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

“Tentu membuat saya dan kita semua marah. Aksinya bukan mencerminkan seorang dokter, tapi malah seperti penjahat. Saya minta





Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago.

aparatus kepolisian mengusut serius kasus ini," ungkap Nihayatul.

Seharusnya, menurut Nihayatul, dokter adalah tumpuan rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Ia mengingatkan para dokter seharusnya memegang teguh sumpah yang diucapkan dengan kesungguhan, bukan justru bertindak asusila.

Perlu diketahui, satu dari sebelas sumpah Dokter Indonesia yang harus dipegang teguh adalah "Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter," Sebab itu, terangnya, kriminalitas yang dilakukan para pelaku mencederai mutu dan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia.

"Mereka itu kan disumpah, ada kode etik dokter. Tidak mudah menjadi dokter, tapi kalau tindakannya justru asusila, ya tentu saja itu bukan cerminan dokter, malah mengkhianati sumpahnya sendiri," tegasnya.

Menindaklanjuti setiap kasus ini, Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi

Sadikin di Gedung DPR RI, April silam. Dari puluhan anggota dewan yang hadir, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menanggapi dengan lantang bahwa kasus tersebut berdampak sangat besar dan perlu perhatian serius, karena sudah mencoreng kepercayaan publik terhadap dunia kedokteran.

"Enggak boleh Bapak tinggalkan, jadi bukan hanya yang meninggal. Besar, Pak. Trauma fisik itu bagi perempuan seperti kami ini, kalau mengalami hal seperti itu untuk

seumur hidup, Pak. Apalagi, stigma di Indonesia ya, begitu tahu diperkosa banyak laki-laki yang enggak mau. Bapak harus pikirin itu," ungkapnya.

Selaras, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus yang terjadi di lingkup pendidikan kedokteran. "Ini kalau terjadi di rumah sakit tanggung jawab siapa? Ini kan penting, masyarakat harus tahu, supaya tidak lempar-lemparan," kata Felly.

Dirinya juga mengkritik kebijakan Menteri Kesehatan yang menghentikan sementara PPDS prodi tertentu di rumah sakit tempat terjadinya kasus perundungan dan kekerasan seksual. Menurutnya, pembekuan program PPDS anestesi di dua rumah sakit itu akan berdampak pada kerugian yang lebih besar, yakni menghambat dokter residen lain yang tidak bersalah untuk lulus tepat waktu.

"Kita setuju, oknum itu wajib kasih hukuman. Kami setuju itu. Tapi, peserta didik yang tidak bersalah yang turut menerima hukuman ini sehingga terjadi perlambatan, Pak, kelulusan. Ini dia harus tambah studi lagi. Dipikirkan enggak Pak?" imbuhnya. **um/mh**



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

# Menguatkan Pusat Logistik Berikat

**Ada kesepakatan penting dari tiga lembaga. Pusat Logistik Berikat (PLB) segera diperkuat sebagai hub logistik nasional. Pusat logistik digeser dari luar negeri ke dalam negeri melalui PLB.**

Ini adalah kesepakatan oleh tiga lembaga, Komisi XI DPR RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Kementerian Keuangan. Langkah strategis ini dicapai saat rapat dengar pendapat Komisi XI pertengahan Mei lalu. Pengawasan atas barang-barang ilegal juga jadi keniscayaan atas kesepakatan ini.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi upaya pemerintah

dalam menggeser pusat logistik dari luar negeri ke Indonesia melalui PLB. Menurutnya, inisiatif ini harus dikuatkan demi mendukung industri dalam negeri. "Tadi yang disampaikan Pak Dirjen itu memang bagus. Bapak sampaikan bahwa terjadi pergeseran pusat logistik dari luar negeri ke Indonesia, dan yang seperti itu harusnya dikuatkan," tegas Misbakhun.

Misbakhun juga menyoroti pentingnya menekan *dwelling time* (waktu tunggu bongkar muat barang) di pelabuhan yang menjadi salah satu hambatan bagi penguatan industri domestik. Hal itu penting untuk menghilangkan cerita-cerita tentang PLB yang jadi pintu masuk barang-barang ilegal tanpa melalui prosedur kepabeanan.

Di sisi lain, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2025 menunjukkan bahwa total nilai transaksi penyelundupan barang diperkirakan mencapai Rp216,19 triliun selama periode 2021 hingga triwulan III-2024. Salah satu modus penyelundupan tersebut disinyalir terjadi melalui penyalahgunaan kawasan berikat.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendesak DJBC

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.



FOTO: FARHAN/VEL





Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin.

memperketat pengawasan di PLB. "Keberadaan pusat logistik ini pada dasarnya sebagai titik masuk produk impor yang kemudian harus diarahkan untuk pasar ekspor. Bukan justru disalahgunakan, sehingga terjadi kebocoran produk yang berpotensi membanjiri pasar dalam negeri," ujar Putri. Ia menambahkan bahwa kebocoran ini dapat berdampak negatif pada industri lokal dan menggerus penerimaan negara dari pajak dan bea cukai.

Putri juga menyoroti pentingnya PLB dalam membantu mengurangi biaya logistik nasional yang saat ini masih berkisar 14 persen dari PDB. "Kita harus pastikan PLB dapat berfungsi sesuai tujuan awalnya. Terutama untuk membantu mengurangi

**“Keberadaan pusat logistik ini pada dasarnya sebagai titik masuk produk impor yang kemudian harus diarahkan untuk pasar ekspor. Bukan justru disalahgunakan, sehingga terjadi kebocoran produk yang berpotensi membanjiri pasar dalam negeri**

**Putri Komarudin**  
Anggota Komisi XI DPR RI

biaya logistik yang masih kisaran 14 persen PDB," ungkap Putri. Dengan mendekatkan bahan baku impor ke industri melalui PLB, diharapkan efisiensi logistik dapat tercapai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap PLB. Upaya pengawasan ini meliputi pengawasan petugas hanggar, pemeriksaan dokumen, kegiatan monitoring dan evaluasi, hingga pemantauan pelaksanaan tugas.

"Dari pengawasan kami di kawasan fasilitas, di tahun 2023-2024, paling tidak kami melakukan penindakan sampai 220 kali penindakan setiap tahun. Kemudian, sampai dengan Mei 2025, kami sudah lakukan penindakan sebanyak 81 kali untuk barang-barang ilegal dan barang yang tidak diperkenankan masuk," pungkask Askolani, menunjukkan keseriusan DJBC dalam menindak praktik ilegal.

Kesepakatan bersama ini mencakup dukungan penuh Komisi XI DPR RI terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan hub logistik melalui insentif fiskal, fasilitas industri ekspor-impor, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta peningkatan arus keluar-masuk barang dan penurunan dwelling time.

Selain itu, DJBC berkomitmen memperkuat pengawasan atas penyelundupan barang ilegal demi melindungi industri dalam negeri, memperkuat sosialisasi regulasi dan fasilitas PLB kepada pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah, serta memperluas lokasi PLB di kawasan Indonesia Tengah dan Timur

Terakhir, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun strategi mengatasi tumpang tindih regulasi yang menghambat kinerja di PLB.

ayu/mh

## Revisi UU PPMI

# Melindungi PMI dari Hulu ke Hilir

**Persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang tak kunjung usai. Posisi rentan para pahlawan devisa terhadap berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya, memerlukan payung hukum yang jelas sebagai pelindung.**

inisiasi DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menjadi salah satu langkah konkret menghadirkan payung hukum bagi PMI. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan optimis, penyusunan revisi UU PPMI akan menciptakan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan

"Pada saat sekarang ini mereka belum terlindungi oleh sistem. Tentunya harapan kita kalau semua dapat terdeteksi, semua rapi, berada di negara penempatan mereka, dan mereka bekerja secara legal, maka perlindungan itu akan tetap terjaga," ungkap Bob.

Setidaknya, ada tiga isu utama yang harus dijawab dalam regulasi ini. Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan isu pertama adalah perlindungan terhadap pekerja migran. Ia menekankan banyak pekerja migran Indonesia yang mengalami perlakuan



FOTO: EOT/VEL



sewenang-wenang di negara tempat mereka bekerja. "Oleh karena itu undang-undang ini harus bisa menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian yang seperti itu," tegas Doli.

Isu kedua yang menjadi perhatian adalah aspek ekonomi. Pekerja migran Indonesia merupakan sumber devisa terbesar kedua setelah sektor migas, sehingga jika praktik ilegal dalam penyaluran tenaga kerja migran masih banyak terjadi, maka akan banyak potensi keuangan negara yang hilang.

"Memang harus diatur sedemikian rupa supaya tidak lagi ada yang ilegal, artinya tidak lagi ada sumber atau potensi keuangan negara yang menguap, yang harusnya masuk ke negara tapi entah ke mana-mana gitu, karena dilaksanakan secara ilegal atau namanya sekarang nonprosedural," paparnya.

Sementara itu, isu ketiga adalah tanggung jawab negara terhadap pekerja migran, termasuk pascapekerja migran kembali ke tanah air. Doli menilai bahwa ini merupakan langkah progresif dalam kebijakan perlindungan pekerja migran. "Ya, ini terobosan baru menurut saya, agak progresif gitu, bahwa setelah bekerja pun pemerintah punya tanggung jawab," jelasnya.

Sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang, penyusunan RUU PPMI ini merupakan tindak lanjut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. RUU ini menduduki nomor urut 21 dan diusulkan oleh DPR RI. Baleg kemudian membentuk Panja yang bertugas secara khusus membahas dan menyusun perubahan terhadap UU PPMI.

Dalam proses penyusunannya, Panja telah menjaring aspirasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Jaringan Buruh Migran (JBM), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh



Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Indonesia (KSBSI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), akademisi, organisasi pengelola pelatihan pekerja migran, Migrant Care Indonesia, dan International Labour Organization (ILO) Indonesia.

Selain itu, Panja juga melakukan penyerapan aspirasi langsung ke tiga provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Wakil Ketua Baleg Iman Sukri dalam laporannya menyampaikan sejumlah poin perubahan signifikan yang telah disepakati dalam rapat Panja.

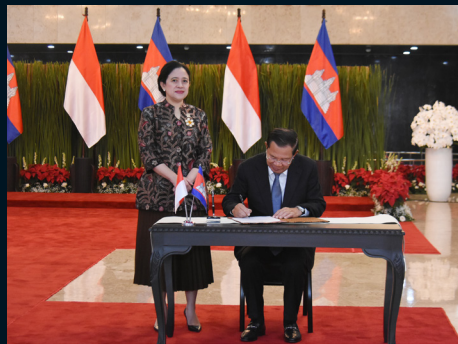
Perubahan tersebut meliputi penyesuaian konsideran, revisi ketentuan umum terkait definisi, perubahan kategori dan persyaratan calon PMI, penegasan hak dan kewajiban calon PMI, PMI, dan keluarga PMI, serta penguatan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Beberapa poin perubahan lainnya mencakup penambahan pasal mengenai kewajiban distribusi informasi peluang kerja di luar negeri oleh

Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), perubahan mekanisme penempatan, kelengkapan dokumen, hubungan kerja dan perjanjian kerja, serta pembentukan kantor layanan PMI di negara tertentu.

RUU ini juga mengatur lebih rinci mengenai pembiayaan penempatan, kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi PMI, sanksi administratif, serta tugas dan tanggung jawab berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah desa.

RUU ini menghapus beberapa pasal yang dianggap tidak relevan dan menambahkan ketentuan baru terkait larangan bagi perseorangan menawarkan peluang kerja di luar negeri, penyelesaian perselisihan, penyidikan, ancaman pidana, partisipasi masyarakat, serta ketentuan peralihan yang memberikan pengampunan bagi PMI non-prosedural yang melaporkan diri dalam jangka waktu tertentu setelah undang-undang ini diundangkan.

bia/mh



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima kunjungan kehormatan Ketua Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Pertemuan ini merupakan upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, khususnya di bidang parlemen, perdagangan, pertahanan, hingga isu-isu sosial yang menjadi perhatian bersama. Foto: Jaka/Andri

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir melakukan Kunjungan Kerja meninjau persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2025 di Embarkasi Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (19/05/2025). Foto: Azka/Andri







Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat meninjau kesiapan keberangkatan jemaah calon haji (Calhaj) dari Kloter 13 dan 14 di Embarkasi Kertajati, Indramayu, Jawa Barat, Minggu, (18/5/2025). Foto: Ubed/Andri



Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto, menerima kunjungan delegasi Parlemen Republik Ceko yang dipimpin oleh Deputy Speaker of the Chamber of Deputies, Jan SkopeÅek, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto: Arief/Andri





Komisi III DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), guna memperkaya penyusunan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Foto : Devi/Andri



Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan hampir dengan seluruh asosiasi pengemudi transportasi online Indonesia di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). hal ini dimaksudkan untuk menjaring masukan terkait Rencana pembentukan Undang-Undang (UU) tentang angkutan berbasis aplikasi.

Foto : Oji/Andri



Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, audiensi antara Komisi XIII dengan Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) NTT di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Foto: Runi/Andri



Ketua BKSAP Mardani Ali Sera melakukan FGD yang dihadiri Duta Besar Palestina di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (20/5/2025). Mardani mengatakan Komitmen Indonesia untuk membantu Palestina semakin nyata dengan terjalannya kolaborasi erat antara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan 126 lembaga dan organisasi masyarakat peduli Palestina. Foto: Prima/Andri



Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Mengelar sidang Etik yang dipimpin Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam di ruang sidang MKD DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). MKD DPR RI, memutuskan anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani Prasetyo terbukti melanggar kode etik DPR RI, dan diberikan sanksi ringan, atas laporan pengaduan No.23 tanggal 26 Maret 2025 dan Laporan Pengaduan Nomor 27 tanggal 24 April 2025. Foto: Prima/Andri



Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, melakukan Rapat Dengar Pendapat BAM DPR RI dengan para perwakilan Masyarakat Pesisir Utara Banten di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Foto: Oji/Andri





# Rycko Menoza

## Jejak langkah Sang Putra Lampung





Jakarta 1971. Ibu kota waktu itu masih terlihat lengang. Jalan-jalan protokol belum macet seperti sekarang. Suatu hari, sepasang insan sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Di sebuah rumah sakit di Jakarta, seorang ibu bersahaja kelelahan, setelah menjalani persalinan. Bibirnya mengucap tahmid tiada henti. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 30 Agustus 1971. Bayi laki-laki lahir dan diberi nama Rycko Menoza.

Rycko kecil lahir di tengah keluarga religius dan penuh disiplin. Ayahnya bernama Sjachroedin ZP seorang perwira polisi yang sedang berdinastikan di Polda Metro Jaya. Sementara ibunya adalah Truly Triwulandari SZP. Setelah kelahiran Rycko, masih ada tiga adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Rycko adalah sulung dari empat bersaudara. Keluarganya ketika itu tinggal di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta. Walau ia anak perwira polisi, Rycko tak membatasi diri bermain dan bergaul dengan sahabat-sahabat kecilnya.

Saat kecil, Rycko sangat senang bermain bola bersama sahabat-sahabatnya di sekitar komplek rumah setelah pulang sekolah. Selain itu, ia juga gemar bermain benteng dan congklak. Jika mengingat masa kecilnya, ia merasa sangat bahagia. Sementara itu, pendidikan formal Rycko dimulai di TK Iskandaria pada tahun 1975, kemudian melanjutkan ke SD Iskandaria hingga kelas II. Pada kelas III, ia pindah ke SD Islam Al Azhar, Jakarta Selatan, dan setiap hari, ayahnya mengantar-jemputnya sekolah sambil melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta.

Semasa kecil, Rycko menempuh pendidikan di Al Azhar, di mana ia banyak mendapatkan pelajaran agama yang membentuknya menjadi pribadi religius. Pada tahun 1983, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Palembang,

“  
**Semasa kecil, Rycko menempuh pendidikan di Al Azhar, di mana ia banyak mendapatkan pelajaran agama yang membentuknya menjadi pribadi religius**

Sumatera Selatan, setelah sang ayah diangkat menjadi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Sumbagsel, yang mengharuskan keluarganya pindah ke kota tersebut. Selama di Palembang, Rycko dikenal senang bersepeda ke sekolah. Namun, setelah dua tahun menempuh pendidikan di sana, ia kembali pindah ke Bandar Lampung untuk melanjutkan kelas 3 SMP hingga lulus, seiring penugasan baru sang ayah di kota tersebut.

Pada tahun 1986, Rycko kembali ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di SMA Al Azhar, ia kembali bertemu dengan sahabat-sahabat lamanya. Selama bersekolah di sana, ia menunjukkan minat yang besar terhadap pelajaran sejarah, ilmu pasti, dan IPA. Rycko dikenal dekat dengan para guru, meskipun sifat isengnya kadang muncul. Salah satu kenangan menarik terjadi saat ia duduk di kelas I SMA, ketika ia membawa cairan amoniak ke dalam kelas dan bersama seorang temannya memecahkan wadahnya hingga bau menyengat langsung menyebar ke seluruh ruangan. Akibatnya, seluruh siswa berhamburan keluar karena tak tahan dengan aromanya.

Setelah dua tahun belajar di SMA Al Azhar, Rycko kembali harus



FOTO: IKA/VEL

pindah sekolah ke SMAN 5 Bandung, mengikuti sang ayah yang mendapat tugas baru sebagai Wakapolwiltabes Bandung, Jawa Barat. Kepindahan sekolah yang berulang ini merupakan konsekuensi dari ritme penugasan sang ayah yang kerap berpindah tempat pengabdian.

## Melanjutkan Pendidikan S2

Bila ditanya cita-citanya sewaktu kecil, ia ingin menjadi polisi seperti ayahnya. Kebetulan semasa aktif menjadi polisi, ayahnya suka mengajak Rycko melihat-lihat apa saja yang dikerjakan seorang polisi. Kedisiplinan, ketegasan, dan kecepatan bertindak tertanam sejak dini. Dari situlah ketertarikan menjadi polisi terus tertanam.

Setamat SMA, Rycko muda benar-benar mengejar mimpinya menjadi polisi. Ia mendaftar di Akademi Kepolisian RI, Semarang dan diterima. Pada saat yang bersamaan, ia juga mencoba peruntungan di

perguruan tinggi negeri dan berhasil diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali. Namun, karena Akpol lebih dahulu memberikan kepastian penerimaan, ia pun mengambil keputusan bulat untuk menempuh pendidikan sebagai taruna polisi dan melepaskan kesempatan menjadi mahasiswa di Universitas Udayana.

Awal menjadi taruna kawah chandradimuka Magelang, masih menyatu dengan taruna dari tiga angkatan lainnya, TNI AD, AL, dan AU. Teman-teman satu angkatannya alumni 1992 dari TNI AD adalah Letjen Kunto Arief Wibowo (anak mantan Wapres Try Sutrisno). Lalu, ada KSAD Maruli Simanjuntak, KJP Wahyu Hadiningrat Astamarena Kapolri, Sekjen Kemenham RI KJP Nico Afinta, Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan Kemendagri KJP Makhruzi Rahman, dan lain- lainnya.

Rycko hanya menempuh pendidikan sebagai taruna selama dua tahun setengah sebelum memutuskan untuk keluar dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1991, di mana ia sangat menyukai mata kuliah statistik. Ia menyelesaikan studinya di kampus tersebut pada tahun 1996, dan sebelum resmi diwisuda, sang ayah memintanya untuk melanjutkan pendidikan S2 ke Amerika Serikat. Menanggapi permintaan tersebut, Rycko kemudian memilih untuk mengambil program Master Business of Administration (MBA) dengan konsentrasi Marketing di Oklahoma City University, Oklahoma, USA.

Tahun 1998, pulang ke Tanah Air, saat kondisi negeri sedang rusuh. Presiden Soeharto ketika itu lengser dari tampuk kekuasaannya. Tak lama di Indonesia, ia kemudian balik ke Amerika lagi untuk bekerja di Alexandria, VA dekat Washington DC. Hanya setahun bekerja, ia memutuskan pulang ke



(1) Foto kenangan saat kelas 3 SD di Al Azhar Jakarta. (2) Saat kuliah di AS. (3) Nostalgia 30 tahun Akpol angkatan 1992, makan bersama di ruang makan taruna. (4) Menerima penghargaan dari Presiden Jokowi saat HUT Pramuka di Cibubur, Jakarta.

Indonesia. Di sinilah ia memulai karir profesionalnya. Pernah membuka usaha mengurus izin senjata api/ karet untuk kalangan sipil dengan prosedur ketat, lalu membuka usaha tambang timah di Bangka, Sumatera Selatan.

## Panggung Politik

Pergaulannya yang sangat luas di dunia usaha dan dorongan sang ayah yang Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, menggugah Rycko terjun ke panggung politik. Kebetulan selepas pensiun dari kepolisian, ayahnya sudah lebih dulu menjadi politisi. Sang ayah pernah menjadi gubernur Lampung dua periode 2004-2008 dan 2009-2014. Bahkan, kakek Rycko, Zainal Abidin Pagaralam adalah peletak dasar pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Lampung sekaligus menjadi Gubernur Lampung periode 1966-1972.

Perjalanan politik Rycko dimulai ketika ia mengikuti kontestasi Pilkada

di Lampung Selatan pada tahun 2009, dan berhasil terpilih untuk menjabat selama lima tahun. Rycko kemudian memutuskan bergabung dengan Partai Golkar, menandai langkah baru dalam karir politiknya di 2014 saat menjabat sebagai Bupati di Lampung Selatan.

Pada Pemilu 2024, Rycko terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I dengan perolehan suara sebanyak 53.813, memanfaatkan basis dukungan politik yang telah ia bangun sejak menjabat sebagai bupati. Pada 1 Oktober 2024, ia resmi dilantik sebagai anggota DPR RI di Senayan. Mantan Ketua DPD KNPI Lampung ini kemudian ditempatkan di Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, serta tercatat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pada masa reses pertamanya sebagai wakil rakyat, Rycko turun langsung menemui masyarakat di





(5) Hobi berolahraga lari. (6) Rycko Menoza saat menjabat Bupati Lampung Selatan. (7) Saat menerima penghargaan dari Presiden SBY, tahun 2014 (8) Bersama keluarga tercinta.

daerah pemilihannya. Kehadirannya tidak lagi asing bagi sebagian besar warga Lampung, mengingat rekam jeaknya di daerah tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pariwisata.

"Saya mau masyarakat merasakan perubahan. Ada hal yang saya bawa untuk kemajuan pariwisata

di Lampung. Pada Ramadan lalu, saya bawa program sosialisasi pariwisata dan peningkatan SDM-nya. Faktor penting pariwisata tidak hanya alam, tetapi manusianya juga perlu dibentuk, agar tempat wisata bisa ditunjang oleh SDM-nya," jelas Rycko, yang juga menjabat sebagai Komisaris PT *Holdwell Bussiness Park*.

Tidak hanya itu, di masa reses Rycko juga aktif membantu

masyarakat, diantaranya dengan memberi bantuan susu untuk anak sekolah sebanyak 5000 box, bantuan alat pengering jagung kepada Gapoktan di Lampung Selatan, mengadakan program gerakan pangan murah, dan banyak lagi lainnya.

## Rutin Olahraga

Kesibukannya sebagai wakil rakyat telah menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Namun, saat di rumah, Rycko tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Di rumahnya ada istri tercinta Pitka Menoza dan buah hatinya Reina. Ketika ada waktu luang bersama keluarga, ia suka mengajak keluarganya berwisata. Peraih gelar MBA tersebut lebih memilih berwisata ke pegunungan yang berudara sejuk dan dingin. Mantan Ketua AMPG Lampung ini juga mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai makanan Jepang, seperti sashimi dan sushi. Menurutnya, makanan Jepang lebih sehat karena banyak mengandung protein dan *hygienis*.

Olahraga jogging telah menjadi salah satu hobi favorit Rycko, dimana setiap minggunya ia menyempatkan diri untuk berlari atau jogging sebanyak tiga kali dan selalu mencatat jarak yang ditempuh melalui aplikasi Strava. Selain itu, Rycko juga memiliki hobi tenis, dan berkat keaktifannya di dunia tenis, ia terpilih menjadi ketua umum Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Provinsi Lampung periode 2025-2029 secara aklamasi.

Selain menjaga hobinya dengan jogging, Rycko juga memiliki kecintaan pada dunia otomotif. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Lampung, sejumlah hal ini semakin menegaskan minatnya yang luas pada berbagai olahraga dan hobi. rmm/mh

# Menjaga kedaulatan Laut dengan Transformasi Digital

**Komisi I DPR RI terus menunjukkan komitmennya memperkuat kedaulatan nasional di bidang teknologi dan keamanan laut. Ekosistem digital penting dibangun untuk menjaga kedaulatan negara dan tidak lagi bergantung pada teknologi dari luar negeri.**



Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

**F**okus utama kunjungan kali ini mencakup kesiapan ekosistem transformasi digital nasional, evaluasi sistem pertahanan laut, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut

(RUU Kamla).

Dalam kunjungan ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Depok, Jawa Barat (16/4/2025) lalu, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti pentingnya membangun ekosistem

digital nasional yang tidak hanya bergantung pada teknologi luar negeri.

Ia menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan infrastruktur modern, namun juga membutuhkan *roadmap* nasional yang mencakup pengujian perangkat, industri lokal, dan keamanan digital. "Kalau kita tidak mulai membangun ekosistemnya dari sekarang, Indonesia hanya akan jadi pasar, bukan pemain," ujarnya.

Sukamta juga mendorong penguatan industri perangkat digital lokal serta pemberdayaan talenta dalam negeri, termasuk lulusan universitas dan SMK, agar tidak tersisih oleh tenaga asing. Selain itu, ia menyoroti kebijakan peralihan dari SIM fisik ke e-SIM sebagai langkah positif dalam perlindungan data pribadi. Namun, belum meratanya kesiapan perangkat masyarakat bisa menimbulkan keresahan. "Baru 41% ponsel yang kompatibel e-SIM. Ini harus dilakukan bertahap," tegasnya.

Sementara itu, di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Australia, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono memimpin kunjungan kerja ke Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang, Jumat (25/4/2025) lalu. Ia mengapresiasi kinerja Lantamal VII yang tetap optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan peralatan dan personel.

Dave menekankan perlu dukungan negara dalam bentuk sistem monitoring, intelijen, serta peningkatan armada dan kerja sama internasional untuk mengantisipasi ancaman seperti penyelundupan barang, pencurian ikan, dan perdagangan narkoba.

"Nah, ini jelas butuh dukungan dari negara, tetapi juga dibutuhkan peralatan yang memadai, apakah monitoring sistem, intelijen sistem, kapal, personel, dan harus diiringi dengan kerja sama yang intens. Termasuk melakukan *delivery diplomacy* dengan negara-negara





FOTO: GALUH/VEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono bersama tim saat Kunjungan Kerja Komisi I ke Kupang, NTT, Jumat (25/4/2025).

sahabat untuk bisa sharing information kita akan kemungkinan penyelundupan barang asing yang berbahaya," jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan keamanan laut yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

"Kita memiliki target mengawal Astacita sampai benar-benar rampung dari sisi kelautan. Ini juga dibutuhkan gebrakan dari pemerintah untuk menjaga keamanan laut yang nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusianya berjalan dengan baik," tutupnya.

Di Batam, Kepri, Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan, menyoroti tumpang tindih kewenangan antar-lembaga yang selama ini menghambat efektivitas pengamanan laut. Ia menegaskan pentingnya kejelasan hukum dan pembagian tugas yang tegas dalam RUU Kamla yang saat ini tengah disusun.

"Laut kita harus kuat, dan hukum harus dijalankan dengan jelas, siapa yang bertanggung jawab, siapa melakukan apa. Itu semua harus diatur dalam undang-undang. Karena itu, hari ini kami hadir untuk mendengarkan masukan langsung dari para pelaksana di lapangan, termasuk di Lantamal IV ini," tegas Junico, Kamis (24/4) lalu.

Ditambahkan pula oleh Anggota Komisi I lainnya, Machfud Arifin bahwa tanpa sistem hukum yang jelas, kedaulatan laut Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman. RUU Kamla diharapkan mampu menyatukan peran TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kepolisian dalam satu kerangka hukum yang solid, bebas dari ego sektoral, serta selaras dengan standar hukum internasional. [um.gal,uf/mh](#)



Foto: Ubud/vel

Anggota Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan, bersama tim saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/4/2025).

# Mengawal Otsus Papua dan Pendidikan Putra-Putri Asli Papua

Komisi II DPR RI terus menunjukkan komitmennya mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Salah satu agenda pentingnya adalah evaluasi daerah otonomi baru (DOB).

**P**anja DOB, Komisi II DPR RI berdialog langsung dengan masyarakat dan Pemda. Dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Kamis (1/5) lalu, dialog membincang DOB. Dikatakan

Zulfikar, pembentukan Papua Tengah sebagai provinsi baru telah memberikan semangat baru dan disambut positif masyarakat.

Ia menegaskan, penting peningkatan pelayanan publik, keadilan sosial, serta percepatan

pembangunan infrastruktur kelembagaan, termasuk pembentukan Kantor Wilayah ATR/BPN di provinsi tersebut. "Penetapan Provinsi Papua Tengah ini sangat disambut baik masyarakat. Harapan mereka besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Komisi II hadir untuk menjembatani aspirasi ini ke pemerintah pusat," jelas Zulfikar.

**Penetapan Provinsi Papua Tengah ini sangat disambut baik masyarakat. Harapan mereka besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.**

**Zulfikar Arse Sadikin**  
Wakil Ketua Komisi II DPR RI



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, saat memimpin pertemuan Kunker Tim Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI, Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/5/2025).





Foto: Ridwan/vel

Wakil Ketua Komisi II Bahtra (dua dari kanan), saat saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (3/5/2025).

Dukungan infrastruktur kelembagaan di Papua Tengah juga mendapat sorotan. Salah satunya pembangunan Kantor Wilayah ATR/BPN di provinsi ini. "Kita minta Kementerian ATR/BPN segera mewujudkan kantor pertanahan di kabupaten/kota yang belum memilikinya, termasuk memastikan Papua Tengah punya Kanwil ATR/BPN sendiri," harapnya..

Tak hanya di Papua Tengah, Komisi II juga mengunjungi Papua Barat Daya, Sabtu (3/5/2025). Lalu, dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Komisi II Bahtra menekankan bahwa Dana Otonomi Khusus harus dimaksimalkan untuk mendukung kemajuan pendidikan, khususnya bagi putra-putri asli Papua. Ia menyampaikan bahwa pemberian beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu instrumen penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.

"Tujuan dari Otsus ini salah satunya, agar anak-anak Papua bisa mengenyam pendidikan yang layak, bahkan sampai ke luar negeri. Dan pada saatnya mereka kembali untuk membangun tanah kelahirannya," ungkap Bahtra. Ia juga menegaskan bahwa pemekaran wilayah di

**Dana Otonomi Khusus harus dimaksimalkan untuk mendukung kemajuan pendidikan, khususnya bagi putra-putri asli Papua.**

**Bahtra**  
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Papua melalui DOB harus menjadi pemicu percepatan pembangunan. Ia mengapresiasi semangat Pemda yang terus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, pemekaran empat provinsi baru, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya diharapkan dapat mempercepat distribusi layanan publik dan pembangunan yang lebih adil.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda besar Komisi II dalam memastikan bahwa DOB benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan Papua dapat sejajar dengan provinsi lain di Indonesia dalam hal kemajuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. uf,rdn/mh



Anggota Komisi III DPR RI, Hinca I. P. Panjaitan, saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Serang, Banten, Selasa (29/4/2025).

# Butuh Tindakan Tegas Atasi Peredaran Narkotika

**Situasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia kembali jadi sorotan tajam Komisi III DPR RI. Kunjungan kerja spesifik ke Banten dan Medan mengungkap gambaran memprihatinkan terkait maraknya kejahatan narkotika yang memerlukan penanganan serius dan pendekatan yang lebih dari sekadar penghukuman.**

**A**nggota Komisi III DPR RI, Hinca I. P. Panjaitan, menggambarkan kondisi Banten sebagai "neraka narkotika"

usai mendengarkan pemaparan dari Kapolda dan Kajati Banten. Ia menegaskan, Banten jadi salah satu daerah penyumbang tertinggi angka penyalahgunaan narkotika.

Penangkapan besar-besaran dan tuntutan pidana mati pun tidak mampu menghentikan peredaran barang haram tersebut.

"Kalau saya mau menyebut langsung, bahasa kami yang paling simpellah, neraka ini ya. Neraka dalam artian luar biasa kejahatan narkotika di sini," ungkap Hinca usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Serang, Banten, Selasa (29/4/2025) silam.

Hinca menekankan, perlu perubahan pola pikir dalam pemberantasan narkotika, dengan fokus pada pengejaran aset hasil kejahatan narkotika melalui pendekatan Tindak Pidana Pencucian



“

**Perlu perubahan pola pikir dalam pemberantasan narkoba, dengan fokus pada pengejaran aset hasil kejahatan narkoba melalui pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Hinca I. P. Panjaitan**  
Anggota Komisi III DPR RI

Uang (TPPU), mengingat transaksi narkoba kini semakin canggih menggunakan kripto dan teknologi di dark web.

"Kendalanya sekarang transaksinya sudah tidak pakai uang tunai, tapi pakai kripto, pakai teknologi, lewat website gelap. Inilah yang saya maksud sebagai neraka, karena kejahatannya sudah luar biasa canggih," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak sosial dari narkoba yang turut melahirkan kejahatan lain seperti begal dan tindak kekerasan sadis. Ia menyebut bandar narkoba sebagai "teroris terbesar di dunia", karena efek destruktifnya terhadap generasi muda dan masa depan negara.

"Kalau yang dikejar cuma pemakai, ya enggak akan selesai. Kejar itu satu bandar," pungkasnya.

Senada dengan kondisi di Banten, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul, menyampaikan keluhan masyarakat Pematangsiantar,

“

**Di Siantar ini masih banyak penjualan narkoba. Kebetulan ini kampung halaman saya. Jadi, saya tahu betul keresahan masyarakat.**

**Muhammad Rahul**  
Anggota Komisi III DPR RI

Sumatera Utara, terkait peredaran narkoba yang semakin terbuka. Dalam rapat dengan Polda Sumut, Rahul meminta Kapolda mengambil tindakan tegas terhadap kondisi yang meresahkan masyarakat di kampung halamannya tersebut. Ia mengungkapkan bahwa transaksi narkoba terjadi secara terang-terangan.

"Saya mendorong Pak Kapolda di kota Siantar, Pak, ini banyak laporan masyarakat. Di Siantar ini masih banyak penjualan narkoba. Kebetulan ini kampung halaman saya. Jadi, saya tahu betul keresahan masyarakat. Isunya penjualan ini terbuka, jadi bukan tertutup lagi. Tentu harapan kami sebagai warga Siantar, bagaimana narkoba ini bisa diberantas," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Meski demikian, Rahul mengapresiasi keberhasilan Polres Asahan dalam menangkap pengedar narkoba dengan barang bukti besar dan berharap Polres Pematangsiantar dapat mencontoh tindakan tegas tersebut. Komisi III DPR RI berjanji akan terus mengawasi penegakan hukum agar peredaran narkoba tidak lagi menjadi keluhan masyarakat.

ysm,stu/mh



FOTO: ESTU/VEL

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Medan, Kamis (27/03/2025).

# Komisi IV Soroti Sektor Kelautan, Pertanian, dan Kesehatan

Komisi IV DPR RI menunjukkan kepedulian serius terhadap berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan sektor kelautan, pertanian, bahkan kesehatan di sejumlah daerah. Dalam kunjungan kerja ke Sabang, Karawang, dan Palembang, para anggota dewan menyoroti hambatan pembangunan hingga lemahnya pengawasan dalam proyek dan kebijakan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

**D**i Sabang, Aceh, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mendesak Pemerintah Provinsi

Aceh mempercepat penyelesaian pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Le Meulee. Proyek yang telah berjalan sejak 2017 dengan pendanaan hibah dari Pemerintah Jepang ini dinilai berjalan terlalu lambat. Hingga kini, dermaga dan fasilitas inti belum juga rampung.

"Ini sudah tahun 2025, tapi baru kerangkanya saja. Dermaganya pun belum selesai. Ini jelas terlalu lambat dan harus segera dipercepat," tegas Siti Hediati. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan, agar bantuan luar negeri tidak disalahgunakan. "Kalau dapat bantuan hibah dari Jepang, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, jangan dikorupsi atau diselewengkan," ujarnya. Ia bahkan menugaskan anggota Komisi IV asal



Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, bersama tim saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Ke Sabang, Provinsi Aceh, Rabu, (9/04/2025).

FOTO: HANJUM/VEL





Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan saat melakukan kunjungan reses di Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), (09/04/2025).

Aceh, Teuku Abdul Khalid, untuk mengawal langsung percepatan proyek ini.

Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memimpin inspeksi mendadak ke sentra penggilingan padi milik Perum Bulog. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penyerapan hasil panen petani sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menargetkan Bulog menyerap 3 juta ton gabah dan beras.

Alex menyoroti rendahnya target serapan tersebut yang hanya mencakup 10 persen dari total produksi nasional yang diperkirakan mencapai 30 juta ton. "Kalau Bulog hanya menyerap 10 persen, siapa yang menyerap sisanya? Harus ada *blueprint* mekanisme penyerapan gabah nasional yang transparan," tegasnya. Ia mendorong peran Bulog diperkuat agar dapat menyerap hasil panen petani tanpa pembatasan kualitas atau kuantitas, terutama saat panen raya.

Di sisi lain, perhatian terhadap sektor kesehatan dan keamanan

“  
**Yang paling menggembirakan, Badan Karantina ini sekarang sudah mandiri. Dulu bagian dari Kementerian Pertanian, sekarang berdiri sendiri.**

**Herry Dermawan**  
Anggota Komisi IV DPR RI

pangan juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan saat kunjungan ke Palembang. Ia mengapresiasi kinerja Badan Karantina Indonesia yang dinilainya telah menunjukkan peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya bahan berbahaya dan mengendalikan wabah penyakit seperti PMK.

“Yang paling menggembirakan, Badan Karantina ini sekarang sudah mandiri. Dulu bagian dari Kementerian Pertanian, sekarang berdiri sendiri. Mungkin fungsinya tidak kasatmata, tapi manfaatnya luar biasa bagi keselamatan masyarakat Indonesia,” ujar Herry usai melakukan kunjungan reses di Palembang, Sumsel, Rabu (09/04/2025) lalu.

Namun, Herry juga menyoroti perlunya penguatan fasilitas laboratorium karantina agar sebanding dengan standar internasional. “SDM mereka luar biasa, tapi lab-nya belum secanggih negara lain. Padahal, uji-uji lab itu penting untuk mendeteksi bahaya. Saya akan bawa ini ke rapat Komisi IV agar pemerintah segera melengkapi alat-alat mereka. Tidak mahal kok, dan pemerintah pasti mampu,” tegasnya.

Ia berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggaran bagi Badan Karantina agar lembaga yang baru berdiri dua tahun ini bisa semakin efektif menjaga ketahanan pangan dan kesehatan nasional. [@oji.hnm/mh](#)

# Mengawasi Proyek Strategis di Kalteng, Manado, dan Jambi



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, saat kunjungan kerja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (15/04/2025).

**Komisi V DPR RI menunjukkan perhatian serius terhadap pemerataan pembangunan dan penanggulangan bencana di berbagai daerah. Dalam beberapa kunjungan kerja rspesifiknya baru-baru ini, para wakil rakyat ini menyoroti urgensi perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penanganan risiko banjir.**

**D**i Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur jalan dan sarana pendidikan yang masih memprihatinkan. Usai meninjau langsung asrama mahasiswa dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya, Huda mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian lebih dan mempercepat bantuan, terutama

perbaikan jalan nasional yang sebagian besar masih berupa tanah dan fasilitas pendidikan seperti asrama mahasiswa.

"Pendidikan, khususnya sarana prasarana pendidikannya, masih memerlukan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Kita harus memprioritaskan pengembangan fasilitas pendidikan di daerah luar Jawa, termasuk Kalimantan Tengah," tegas Huda di Palangkaraya, Senin (15/04/2025) silam.

la bahkan menyebutkan, kebutuhan anggaran yang signifikan mencapai Rp18 triliun untuk membenahi jalan-jalan tersebut. Huda juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah ini. "Perbaikan jalan ini memerlukan skema proyek yang solid, dan tentunya keterlibatan sektor swasta bisa membantu mempercepat pembangunan, terutama dalam kondisi fiskal yang terbatas," tambahnya.

Sementara itu, di Manado, Sulawesi Utara, fokus Komisi V tertuju pada upaya penanggulangan banjir. Dipimpin Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras, kunjungan kerja dilakukan untuk memantau langsung pelaksanaan proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di tiga sungai utama yang kerap meluap.

"Kami meninjau langsung lokasi penanggulangan banjir di sungai





Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama tim saat meninjau proyek penanggulangan banjir di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (16/4/2025).

ini, untuk memastikan proyek penanggulangan banjir berjalan sesuai rencana," ujar Andi Iwan di Manado, Rabu (16/04/2025) silam. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kendala teknis dan pembebasan lahan agar proyek pengendali banjir dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

"Kami ingin memastikan bahwa

pembangunan ini berdasarkan perencanaan terintegrasi, dengan sistem pemantauan yang jelas dan kolaborasi lintas sektor. Infrastruktur yang dibangun harus mendukung konektivitas, ketahanan bencana, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur konektivitas juga menjadi

perhatian Komisi V. Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekhsah, menyoroti pentingnya penyelesaian segera Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II ruas Betung-Tempino-Jambi. Ia menilai keberadaan tol ini krusial dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

"Harusnya secepat mungkin kalau tadi kita dengar 18 kilometer saja memerlukan waktu 5 tahun, kita berharap tidak mesti 5 tahun untuk 18 kilometer, tapi lebih cepat lagi, lebih panjang," ungkap Musa usai meninjau proyek tol di Muaro Jambi, Senin (14/04/2025) silam. Meskipun memahami adanya kebijakan efisiensi anggaran, Musa berharap proyek-proyek strategis seperti JTTS tetap menjadi prioritas agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas.

"Kita semua berharap ini bisa terlaksana dengan segera supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini merata ke seluruh daerah tidak hanya terpusat di Jawa saja," kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) 1 itu.

[ais,aha,rr/mh](#)



Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekhsah, saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Tol Jambi-Rengat dan Tol Jambi-Palembang.

# Transformasi Digital Pos Indonesia, Penguatan Koperasi, dan Hilirisasi Perkebunan

**Komisi VI DPR RI mendorong transformasi dan pembenahan menyeluruh di sektor-sektor strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mencakup bidang logistik, koperasi, hingga perkebunan. E-commerce jadi keniscayaan untuk dikembangkan.**



Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025).

**D**alam kunjungan ke PT Pos Indonesia, Bandung, Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menegaskan pentingnya transformasi digital menyeluruh bagi PT Pos Indonesia, agar tidak tertinggal di tengah

kompetisi industri logistik yang semakin ketat. Ia menyebut, kekuatan infrastruktur PT Pos Indonesia yang telah menjangkau hingga desa-desa harus diimbangi dengan penguatan teknologi informasi dan integrasi sistem digital yang mendukung e-commerce.

"Infrastruktur PT Pos sudah sampai ke pelosok, tinggal pengembangan software-nya. IT-nya harus diperkuat, diintegrasikan, dan harus bisa kolaborasi dengan platform-platform penjualan online," ujar Demer sapaan akrabnya kepada Parlementaria di sela-sela kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/4/2025) lalu.

Demer sapaan akrabnya, juga menekankan pentingnya efisiensi operasional, keandalan layanan, serta harga yang kompetitif, agar PT Pos Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan swasta. Ia mengingatkan bahwa tanpa transformasi, PT Pos Indonesia berisiko tertinggal seperti dinosaurus yang pernah besar namun punah.

"Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin PT Pos bisa jadi raja di dalam negeri. Tapi kalau tidak mau bertransformasi, ya bisa saja malah jadi seperti dinosaurus pernah besar, tapi akhirnya mati," tutur Demer.

Dalam hal kepemilikan negara, ia menyerukan adanya kebijakan afirmatif seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta reformasi internal yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM), termasuk dalam menghadapi era kecerdasan buatan (AI).

Sementara itu, dalam kunjungan ke Makassar, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H.A.M. Nurdin Halid menyoroti





Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H.A.M. Nurdin Halid saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Rabu (9/4/2025).

pentingnya pembinaan koperasi aktif di desa, baik koperasi unit desa (KUD), koperasi nelayan, maupun koperasi pertanian. Ia menilai koperasi adalah pilar ekonomi konstitusi yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

"Dengan semangat luar biasa Presiden RI Prabowo Subianto mengembangkan koperasi sebagai pelaku ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, dan dalam rangka menyukseskan Asta Cita," ujarnya di Makassar, Rabu (9/4/2025) lalu.

Nurdin juga menyoroti rencana peluncuran Koperasi Merah Putih oleh pemerintah pada Juli mendatang. Ia menilai, meski koperasi tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat, pelaksanaannya tetap harus belajar dari pengalaman masa lalu, khususnya praktik koperasi di era Orde Baru.

"Dulu KUD punya prestasi dalam mewujudkan swasembada beras dan menggerakkan ekonomi rakyat, tapi kemudian tidak dikelola secara profesional. Nah, ini jangan sampai terulang," tegasnya. Selain itu, Nurdin menanggapi instruksi Menteri

Koperasi yang menunjuk kepala desa sebagai pengawas koperasi. Ia berpendapat, sebaiknya kepala desa cukup menjadi tokoh panutan masyarakat, bukan terlibat secara struktural dalam kepengurusan koperasi.

"Koperasi harus terbentuk atas dasar kesadaran, kemauan, dan kepentingan bersama masyarakat desa. Pemerintah cukup memberikan

dukungan berupa alokasi ekonomi, fasilitas, serta kemudahan pembiayaan agar roda ekonomi bisa bergerak. Dengan begitu, cita-cita Pak Prabowo untuk menguatkan ekonomi rakyat berbasis koperasi bisa tercapai," pungkasnya.

Di bidang perkebunan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti stagnasi produksi teh dan karet oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN), berbeda dengan tebu yang mengalami lonjakan signifikan. Dalam pertemuan dengan direksi BUMN sektor perkebunan di Surabaya, Eko menyayangkan potensi besar teh dan karet yang belum dioptimalkan, terutama untuk hilirisasi industri seperti ban dan sarung tangan medis.

"Teh dan karet harus dibenahi produksinya. Teh bisa didiversifikasi, seperti di luar negeri ada ratusan jenis teh dengan nilai jual tinggi. Ini peluang yang belum dimaksimalkan," ujarnya.

Ia mencontohkan suksesnya produksi tebu yang pada 2025 telah mencapai 2,8 juta ton dan berpotensi meningkat hingga 8 juta ton dalam beberapa tahun ke depan sebagai hasil kerja keras dan strategi swasembada yang tepat.

hal,tra,mh/mh



Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan para direksi BUMN bidang perkebunan, kehutanan, dan transportasi di Surabaya.



FOTO: RIDWAN/VEL

Ketua Tim Kunker Komisi VII Saleh Partaonon Daulay saat Kunjungan Kerja di Medan, Sumatera Utara, Kamis (10/4/2025).

# Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dan Pengembangan Pariwisata

Komisi VII DPR RI terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah. Tiga isu strategis menjadi fokus utama: percepatan replanting dan hilirisasi industri kelapa sawit di Sumatera Utara, optimalisasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Banten, serta perlindungan industri lokal di tengah tantangan impor barang jadi di Sidoarjo, Jawa Timur.

**D**alam setiap kunjungan, para anggota dewan menyerap aspirasi dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat, guna

merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemandirian ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta daya saing industri dan UMKM nasional. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berbasis potensi daerah.

Ketua Tim Kunker Komisi VII Saleh Partaonon Daulay menjelaskan kunjungan kerja ini untuk memantau kemajuan program penanaman



kembali (replanting) kelapa sawit dan menjaring masukan terkait rencana hilirisasi industri kelapa sawit. Saleh menegaskan bahwa sektor sawit memiliki peran krusial bagi perekonomian dan keberlanjutan lingkungan Indonesia.

"Sektor sawit ini bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, tetapi juga harapan bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat," ujar Saleh saat membuka pertemuan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (10/4/2025) silam.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan bahwa replanting merupakan kunci keberlanjutan industri sawit dan menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan petani. "Kami di Komisi VII DPR RI mendukung penuh upaya percepatan replanting melalui skema kemitraan yang melibatkan perusahaan, koperasi, dan masyarakat," tegasnya.

Terkait hilirisasi, Komisi VII mendorong agar industri sawit tidak hanya menghasilkan minyak mentah, tetapi juga mengembangkan produk turunan yang berdaya saing tinggi. "PalmCo, sebagai salah satu aktor utama dalam hilirisasi, memiliki peran penting untuk mendorong inovasi dan investasi di sektor ini," kata Saleh. Komisi VII berharap pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan yang mendukung hilirisasi melalui insentif dan penyederhanaan regulasi.

Sementara di Cilegon, Banten, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Banten dalam sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Ia mengingatkan, diperlukan pembaruan strategi dan sinergi kebijakan agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Banten memiliki modal dasar pariwisata yang luar biasa, mulai dari taman nasional,



## Memantau kemajuan program penanaman kembali (replanting) kelapa sawit dan menjaring masukan terkait rencana hilirisasi industri kelapa sawit

**Saleh Partaonan Daulay**  
Ketua Komisi VIII DPR RI

pulau-pulau eksotis, hingga pantai berpasir putih dengan akses yang cukup baik. Namun, ia menilai, promosi dan konsep destinasi wisata masih perlu diperbarui agar tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Kalau potensi ini bisa dimaksimalkan, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat bisa berlipat ganda, bahkan lima kali lipat dibanding

sektor lain seperti pertanian," ujarnya, Rabu (26/3/2025) lalu.

Chusnunia menekankan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi. Jika salah satu sektor berkembang, sektor lainnya juga akan terdorong. Sebaliknya, jika salah satu sektor stagnan, sektor lain bisa ikut terdampak. "Pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif harus saling terhubung dalam kebijakan dan program. Misalnya, di Banten, kalau kita ingin memperkuat pariwisata, maka sektor ekonomi kreatif dan UMKM juga harus mendapat dukungan, baik dari sisi anggaran, pemasaran, maupun sumber daya manusianya," jelasnya.

Komisi VII DPR RI akan meminta kementerian terkait memperkuat pendampingan terhadap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Banten. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong alokasi anggaran yang lebih konkret untuk peningkatan kualitas UMKM dan pemasaran produk-produk lokal. — aar,ssb,rdn/mh

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (26/3/2025).



FOTO: SSB/VEL

# Zakat di Sumut Masih Minim



FOTO: AZKA/VEL

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar, saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/03/2025).

**Pengumpulan zakat di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai masih minim bila disbanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengumpulan dana zakat di Sumut baru mencapai nilai puluhan miliaran. Sedangkan di Jateng dan Jatim sudah triliunan rupiah.**

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menyayangkan pengumpulan zakat oleh Baznas Sumut yang baru

mencapai puluhan miliar itu. "Kami meminta kepada Baznas Sumatera Utara agar aktif bergerak dan inovatif untuk bisa mengumpulkan zakat lebih besar lagi. (Baznas Sumut) harus memikirkan langkah inovatif dalam

menggerakan kesadaran umat Islam untuk berzakat. Sumut ini memiliki muzaki yang lebih banyak dengan memiliki latar belakang profesi yang potensial di sini," ungkapnya di Medan, Sumut, Kamis (27/03/2025) silam.

Legislator Dapil Sumatera Utara III itu menyarankan kepada Baznas Sumut belajar tata cara dan tata kelola kepada Baznas provinsi lain yang sudah berhasil mengumpulkan zakat dalam jumlah besar setiap tahun. Ansory menekankan kepada Baznas Sumut bahwa tidak ada alasan untuk tidak mempunyai inovasi, sehingga harus ada perumusan-perumusan yang inovatif.



karena sudah diberikan tempat kedudukan untuk bisa bergerak membuat inovasi.

"Perlu membuat perumusan baru (untuk) bisa (menarik zakat ke) pemerintah atau juga swasta, karena Sumatera Utara ini tolok ukur dari usaha konglomerat-konglomerat lainnya dari perikanan dan lain-lain," pungkasnya.

Sementara di Yogyakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyoroti bagaimana program sekolah rakyat (SR) besutan Presiden Prabowo Subianto mampu meningkatkan kemampuan SDM dari segi pendidikan. Baginya, peningkatan SDM melalui pendidikan dapat menghasilkan individu yang berkualitas dan menjadi salah satu faktor kunci pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Nah, sekarang yang menarik adalah program (Sekolah Rakyat) yang diserahkan ke Kementerian Sosial, tetap ini masalah kependidikan. Ini luar biasa sebetulnya bahwa ide atau gagasan presiden untuk menaikkan SDM ini tepat. Apalagi, kemudian dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Karena penanggulangan kemiskinan sekarang yang cenderung charity base itu hanya santunan, berupa bantuan tunai atau bantuan nontunai dan sebagainya, dan ternyata menurunkan angka kemiskinan itu tidak signifikan," ucap Fikri di Yogyakarta, Rabu (26/3/2025) silam.

Politisi Fraksi PKS ini juga merasa optimistis keberhasilan program sekolah rakyat yang digagas oleh presiden ini. Karena, menurutnya, hal tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik dari sisi SDM maupun hal lainnya. Tetapi, ia menekan, masih perlu ada koordinasi lebih dalam lagi dalam perencanaannya termasuk koordinasi faktor pendukungnya.

"Kalau tentang mengentaskan kemiskinan, karena dasarnya adalah di SDM. Ini saya kira diskusinya



Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Yogyakarta.

**Peningkatan SDM melalui pendidikan dapat menghasilkan individu yang berkualitas dan menjadi salah satu faktor kunci pengentasan kemiskinan di Indonesia.**

**Abdul Fikri Faqih**  
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

banyak sekali positif dan sangat mendukung, dan juga optimis. Nah, sekarang ini masalahnya koordinasi tiga hal, misalnya tentang pendanaan, tentang kewenangan, dan juga tentang orientasi pendidikan. Saya kira ini yang menjadi PR kita bersama karena waktunya sangat singkat,

mengingat Juni nanti sudah harus direalisasikan," ujarnya.

Mengenai anggaran, Fikri juga menyoroti bagaimana adanya perubahan pada peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi proses pembangunan sekolah rakyat tersebut. Sehingga, menurutnya, ada sedikit kendala dalam penganggaran yang menjadikan akses pendidikan sampai sekarang ini masih terbilang mahal.

"Tentang anggaran, saya memberikan catatan. Saya pernah di Komisi X, ada PP No.18/2022 perubahan atas PP No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Ternyata K/L itu susah sekali untuk komposisi (mandatory spending) 20%. Dan sebesar-besarnya anggaran untuk kegiatan belajar mengajar itu ternyata harus didistribusikan ke semua kementerian dan lembaga, sehingga akhirnya sampai sekarang pendidikan kita masih dianggap mahal," ujar mantan kepala sekolah di salah satu SMK di Tegal ini.

— azk,mf/mh

# Memantau Kualitas Kesehatan di Bali, Sumatera, dan Palembang



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Bali.

FOTO: PRIMA/VEL

Dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, berbagai isu krusial terkait layanan kesehatan nasional mengemuka. Di Bali, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini, menekankan pentingnya Bali *International Hospital* sebagai destinasi wisata medis yang berstandar internasional.

“Kita mengunjungi rumah sakit internasional pertama di Indonesia yang terletak di kawasan ekonomi khusus.

Rumah sakit ini dibangun atas kerja sama BUMN, dalam hal ini Pertamina, dengan rumah sakit-rumah sakit swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” ungkap

Yahya kepada Parlemen saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (14/4/2025) silam.

Yahya berharap rumah sakit ini mampu mengurangi masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri dengan memastikan seluruh aspek pelayanan berstandar internasional,

termasuk alat kesehatan dan sumber daya manusia. Ia menegaskan, “Yang penting untuk kita ketahui, karena ini rumah sakit bertaraf internasional, maka pelayanannya juga harus bertaraf internasional. Sehingga, tujuan utama dari pendirian rumah sakit ini untuk mengurangi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri bisa terpenuhi,” tegas legislator Dapil Jatim VIII tersebut.

Sementara itu, di Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan di Sumatera, terutama daerah

“

**Rumah sakit ini mampu mengurangi masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri dengan memastikan seluruh aspek pelayanan berstandar internasional**

**Yahya Zaini**  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

perbatasan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperbaiki fasilitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan.

“Ini menjadi koreksi untuk kita sendiri di jajaran Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki. Ini menjadi motivasi semua leading sektor yang ada di bidang kesehatan. Termasuk fasilitas kesehatannya, juga SDM kesehatannya, agar bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya kepada Parlemen di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (16/4) silam.





FOTO: EKI/VEL

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Sumatera Utara.

Putih berharap peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam negeri dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi kebutuhan untuk berobat ke luar negeri. "Sehingga, bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat dan tidak berobat ke luar negeri, tapi bisa mengandalkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di dalam negeri," tutupnya.

Di Palembang, Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kasus gagal ginjal pada generasi muda dan masalah tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit.

Ia menyoroti temuan banyaknya pasien muda yang menjalani cuci darah di RS Muhammad Husein, yang sebagian besar memiliki

riwayat konsumsi minuman energi dan minuman kemasan berwarna sejak usia muda. "Ternyata saya tanya, mereka rata-rata minum minuman energi pada saat mudanya, dan minum-minuman botol yang berwarna segala macam," ungkapnya kepada Parlemen usai kunjungan kerja reses ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (16/4/2025) silam.

Selain itu, Surya juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan terkait sistem pembayaran yang sering menimbulkan masalah. Ia menekankan perlunya solusi yang adil untuk mengatasi masalah tunggakan dan memastikan keberlanjutan operasional rumah sakit.

"Memang harus ada koordinasi antara rumah sakit dan juga BPJS, karena kadang-kadang ini kan antara rumah sakit dan BPJS bukan hanya di Sumsel saja, mungkin di seluruh Indonesia, mereka selalu kontra, berlawanan. Dengan sistem pembayaran yang sekarang, yang sistem paket ada batasannya, juga tidak mencukupi biaya operasional rumah sakit. Jadi ini harus dicari jalan tengahnya menurut saya," tutupnya.

we, eki, pdt/mh



FOTO: WILGA/VEL

Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama, saat mengikuti kunjungan kerja reses ke Palembang.

# Membahas Masa Depan Pendidikan Nasional



Ketua Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat pertemuan dengan akademisi sejumlah universitas di wilayah Jawa Timur.

**Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Komisi X DPR RI ingin merumuskan kembali regulasi pendidikan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, tantangan global, dan kebutuhan masyarakat.**

**K**omisi X DPR RI berkunjung ke tiga provinsi untuk menjangkau aspirasi dan perspektif soal UU Sisdiknas.

Delegasi Komisi X berkunjung ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Jawa Timur, Penbaru, dan Jawa Tengah. Ketua Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang memimpin kunjungan ke Jawa Timur, menyampaikan pemerataan akses pendidikan

tinggi, baik negeri maupun swasta, perkotaan maupun pedesaan. Semuanya harus terjangkau dan berkualitas.

"Perlu menjadi perhatian kami, bagaimana memberikan fasilitasi dan perhatian agar pendidikan tinggi menjadi lebih merata, tidak memandang apakah itu negeri atau swasta, di kota maupun desa, dan juga bisa terjangkau. Bagaimana pengaturan terkait pembiayaan pendidikan tinggi, juga kebijakan

berkelanjutan terkait perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)," ujar Hetifah, di Jatim., Rabu (30/5/2025) lalu.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Komisi X akan menggunakan metode kodifikasi dalam menyusun revisi UU Sisdiknas. Tujuannya untuk menyatukan berbagai regulasi pendidikan agar terjadi harmonisasi dan sinergi dalam sistem pendidikan nasional yang terintegrasi.

"Komisi X DPR menemukan banyak masalah pendidikan yang tidak hanya berasal dari implementasi UU Sisdiknas saja, tetapi juga dari regulasi lain seperti UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.18/2019 tentang Pesantren, serta UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena





Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor LLDIKTI Wilayah XVII di Pekanbaru, Riau.

itu, revisi UU Sisdiknas perlu disertai dengan penyesuaian UU lainnya agar penanganan persoalan pendidikan bisa menyeluruh,” jelas Hetifah.

Di Pekanbaru, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi aspirasi dari para rektor kampus di Provinsi Riau. Masukan dari para rektor itu penting untuk merevisi UU Sisdiknas. “Kami datang untuk menggali masukan dan saran. Banyak yang kami catat, mulai dari isu BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan

Tinggi Negeri) dan BOPTS (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta), hingga beragam beasiswa dan persoalan ketimpangan antara PTN dan PTS,” ujar Lalu di Pekanbaru, Riau, Rabu (30/5/2025) lalu.

Legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu menegaskan, Undang-undang yang sudah dua dekade ini harus beradaptasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berubah, maka regulasi pendidikan pun tidak boleh tertinggal. “Kami ingin hasil revisi ini betul-betul berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional, tanpa meninggalkan satu pun pihak, baik PTN maupun PTS,” tutup politisi Fraksi PKB tersebut.

Sementara di Semarang, Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menilai Revisi UU Sisdiknas sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena sudah mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi yang kini menjadi bagian integral dalam dunia pendidikan.

“Perkembangan teknologi ini sudah sangat maju, dan teknologi telah menjadi bagian dari pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena

itu, UU Sisdiknas dianggap perlu diperbaharui agar dapat mencakup kebutuhan teknologi yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar,” ujar Ali di Semarang, Jateng, Rabu (30/4/2025) lalu.

Legislator daerah pemilihan Banten I itu juga menyoroti pentingnya pembahasan tentang adopsi pelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pendidikan nasional. Ia menilai, meskipun saat ini porsinya masih terbatas, ke depan AI akan menjadi komponen penting yang tak bisa diabaikan dalam proses pembelajaran.



Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang.

“Saya berharap, AI ini dapat membuka terobosan baru dalam dunia pendidikan, mengingat perkembangan pesat di sektor ini. Kita mengakui bahwa masih banyak yang perlu dibahas dan diperbaiki. Kami berkomitmen untuk menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk memastikan perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia,” ucap Ali. [jk,qq,pdt/mh](#)

“  
Perkembangan teknologi ini sudah sangat maju, dan teknologi telah menjadi bagian dari pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

**Ali Zamroni**  
Anggota Komisi X DPR RI

# Literasi Keuangan dan Akses Kredit UMKM

**Komisi XI DPR RI terus mendorong penguatan literasi keuangan dan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke tiga provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).**

**K**unjungan ini difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan serta mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2025) sialm, Komisi XI menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggota Komisi XI I Dewa Gde Agung Widiarsana, menekankan

pentingnya edukasi mengenai perlindungan simpanan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

"LPS berperan vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami mendorong kerja sama LPS dengan lembaga pendidikan, bank lokal, dan komunitas adat dalam menyelenggarakan program literasi keuangan berbasis kearifan lokal," ujar Dewa Gde. Direktur Eksekutif LPS yang turut hadir menyambut baik dukungan DPR RI. Ia menegaskan kesiapan LPS untuk memperluas

jangkauan sosialisasi di Bali melalui media digital, kampanye publik, serta kolaborasi dengan desa adat dan pelaku industri pariwisata.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Lombok Tengah, NTB, Rabu (30/4/2025) lalu, Wakil Ketua Komisi

“

**LPS berperan vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami mendorong kerja sama LPS dengan lembaga pendidikan, bank lokal, dan komunitas adat**

**I Dewa Gde Agung Widiarsana**  
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI



Anggota Komisi XI DPR RI, I Dewa Gde Agung Widiarsana, saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama LPS di Denpasar, Bali.





Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, saat memimpin pertemuan dengan OJK, perwakilan Himbara, Bank NTB, dan Lembaga Keuangan Nonbank di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta.

FOTO: ANDRI/VEL

XI DPR RI Fauzi Amro, memimpin pertemuan dengan OJK, Himbara, Bank NTB, serta lembaga keuangan lainnya. Fokus pembahasan adalah kemudahan akses pembiayaan UMKM, sekaligus sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru yang menysasar pelaku UMKM.

Fauzi mengungkapkan bahwa UMKM merupakan penopang utama ekonomi nasional, termasuk di NTB yang memiliki sekitar 324 ribu pelaku UMKM. "Dana yang telah dikucurkan melalui KUR mencapai Rp22 triliun, sementara sektor non-UMKM Rp50 triliun. Ini menunjukkan potensi besar yang harus terus didukung," katanya.

Ia menekankan bahwa tantangan UMKM bukan hanya soal akses modal, tapi juga legalitas, literasi keuangan, manajemen usaha, hingga pengembalian pinjaman. "Kami hadir untuk menjawab keresahan UMKM. Pertumbuhan ekonomi Lombok yang mencapai 5,02 persen menjadi sinyal positif bagi penguatan peran UMKM ke depan," pungkas politisi Partai NasDem tersebut.

Terakhir, di Manggarai Barat

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya kebijakan makprudensial sebagai salah satu pilar utama Bank Indonesia dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas keuangan, menurutnya, sangat krusial bagi terciptanya pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan, terutama di daerah.

"Lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif akan menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah," ujar Misbakhun saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (30/4/2025) lalu.

Misbakhun menjelaskan, kunjungan ini bertujuan menggali data dan informasi mengenai implementasi kebijakan makprudensial Bank Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menambahkan, Komisi XI juga ingin mengetahui bentuk koordinasi dan sinergi yang dilakukan BI dengan pihak eksternal terkait, serta poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian Komisi XI untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama mitra kerja di DPR RI.

tn,man,gys/mh



Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Labuan Bajo, Manggarai Barat.

FOTO: TAUFIAN/VEL

# NTT Butuh Transisi Energi Hijau

Komisi XII DPR RI menunjukkan fokus kuat pada isu energi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dalam kunjungan kerja spesifiknya ke berbagai daerah. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Komisi XII mendorong percepatan transisi energi ramah lingkungan seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan pariwisata dan investasi di Labuan Bajo.



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi saat melakukan kunjungan spesifik ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

**W**akil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi

menyampaikan, Hampir 165 persen pembangkit listrik di NTT masih menggunakan BBM. Ke depan

harus diubah menjadi energi yang ramah lingkungan. Bambang mengimbau PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT),

Energi ramah lingkungan bisa dimanfaatkan di NTT, seperti matahari, angin, dan biomassa.

"Transisi energi ini penting, terutama karena Labuan Bajo digadang-gadang sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Kita harus pastikan bahwa sumber energinya juga bersih dan berkelanjutan," tambah politisi Partai Gerindra di Labuan Bajo (25/4/2025) lalu.

Ia juga menekankan bahwa transisi energi akan berdampak positif pada efisiensi fiskal negara melalui pengurangan subsidi BBM. "Kalau kita kurangi ketergantungan pada BBM, subsidi juga bisa ditekan, dan itu bisa dialihkan untuk program lain yang lebih strategis," tuturnya.

Komisi XII berkomitmen mengawal proyek-proyek energi di kawasan Indonesia Timur agar sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada masyarakat lokal.

"NTT punya potensi besar, tapi

“

**Transisi energi ini penting, terutama karena Labuan Bajo digadang-gadang sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Kita harus pastikan bahwa sumber energinya juga bersih dan berkelanjutan.**

**Bambang Hariyadi**  
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI

butuh dukungan sistemik, termasuk dari sisi energi. Ini yang terus kita dorong di Komisi XII," pungkasnya.





Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K. Yuniarto, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Palangkaraya.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K. Yuniarto mendorong para pengusaha tambang untuk mematuhi aturan kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi tambang.

"Kehadiran kami di sini ingin mengetahui apakah perusahaan-perusahaan tambang ini sudah melakukan kewajibannya. Kita tidak ingin menutup investasi, tapi berharap semuanya tertib, sehingga masyarakat nyaman tidak terganggu dengan adanya perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah ini," tukas Sigit kepada Parlemen di Palangkaraya (24/4/2025) lalu.

Ia menyoroti masifnya deforestasi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta pendangkalan sungai. Sigit juga mendorong pemerintah pusat dan daerah mencari solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan terkait maraknya penambang emas tanpa izin (PETI) dengan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta pembinaan kepada penambang rakyat.

"Pemerintah berperan dalam menetapkan WPR, memberikan IPR, serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada masyarakat yang terlibat dalam tambang rakyat. Langkah ini perlu dilakukan untuk meredam aksi penambang liar sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat," tandasnya.

Selain itu, ia menilai perlu peningkatan besaran *corporate*

*social responsibility (CSR)*

perusahaan tambang agar lebih maksimal menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak. Komisi XII juga akan menindaklanjuti aspirasi pengusaha tambang terkait kualitas solar industri dan dugaan penyelewengan distribusi solar subsidi.

"Penyelewengan distribusi solar subsidi juga terindikasi cukup marak di daerah pertambangan sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh pihak berwajib dan dilakukan tindakan tegas," tutupnya.

Sementara di Jawa Tengah, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengapresiasi langkah PT Bimasena dalam membangun ekosistem sosial dan lingkungan di sekitar PLTU Batang, Jawa Tengah. Saat kunjungan kerja ke Semarang, Kamis (24/4/2025), Rokhmat menyampaikan, "Kami mengapresiasi PT Bimasena yang telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti pendidikan gratis, pembangunan musala, hingga perbaikan jalan. Pemerintah daerah juga mendapat manfaat langsung berupa kontribusi tahunan sekitar Rp18 miliar," ujarnya.

— upi,oji,aha/mh



Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan saat kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Semarang.

# Merevisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

**Komisi XIII DPR RI secara khusus melakukan kunjungan kerja dengan memfokuskan diri pada revisi UU No.13/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi ini penting untuk kebutuhan perlindungan aktual para saksi dan korban.**

**D**i Surabaya, Jawa Timur, Komisi XIII mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (26/04/2025) silam. Komisi XIII menyoroti batasan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bagian dari upaya memperkuat lembaga tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut berbagai elemen telah berkumpul, mulai dari LPSK, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hingga para korban dari berbagai kasus seperti korban Bom Bali dan korban kekerasan seksual. Namun, Meity menyoroti bahwa korban kejahatan siber belum mendapat perhatian khusus dalam

pembahasan tersebut.

Meity menambahkan bahwa kejahatan siber, seperti penyebaran konten pribadi, meninggalkan dampak psikologis yang besar bagi korban. Sementara hingga kini belum ada solusi yang efektif untuk menghapus semua jejak digital yang merugikan korban.

Dalam konteks revisi UU No. 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Meity mengusulkan agar LPSK dapat lebih aktif bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian kasus korban sebelum memasuki tahap hukum berikutnya.

"Nah di revisi UU ini sebaiknya LPSK bekerja sama dengan stakeholder terkait agar menjadikan lembaga ini sebagai win-win solution



Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, saat mengikuti Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

FOTO: SKR/VEL





FOTO: BIANCA/VEL

Wakil Ketua Komisi XIII Rinto Subekti, saat mengikuti kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/4/2025).

sebelum ke tahap selanjutnya, sehingga hal-hal seperti ini bisa diselesaikan lebih cepat dan korban dapat segera dilindungi," imbuhnya.

“

**Tidak hanya di beberapa provinsi (kantor wilayah LPSK), tapi juga pentingnya LPSK ini harus ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, agar para saksi dan korban bisa melaporkan dengan mudah di setiap provinsi di Indonesia**

**Rinto Subekti**  
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

Sementara di Semarang, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi XIII Rinto Subekti menyampaikan beberapa poin penting terkait masukan yang diterima. Pertama, soal perlindungan bagi saksi, korban, dan keluarganya, termasuk dana bantuan untuk perlindungan saksi.

"Ada juga tadi masukan untuk tidak hanya perlindungan kepada saksi tetapi keluarga juga," kata Rinto kepada Parlementaria, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/4/2025) sialm.

Terkait pendanaan, berbagai opsi sumber dana menjadi perhatian dalam pembahasan. Pada diskusi mengemuka masukan untuk dana perlindungan saksi dan korban menggunakan dana dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), hingga opsi menggunakan dana abadi pemerintah. Isu ini segera dibahas Komisi XIII untuk menemukan formula pendanaan bagi saksi dan korban.

"Tentunya kami juga akan menyesuaikan dengan kementerian keuangan untuk hal tersebut," jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Selain soal perlindungan langsung bagi saksi dan korban, penguatan LPSK melalui pemerataan kantor wilayah juga menjadi isu krusial yang dibahas. Pemerataan ini agar LPSK mudah dijangkau oleh masyarakat.

"Tidak hanya di beberapa provinsi (kantor wilayah LPSK), tapi juga pentingnya LPSK ini harus ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, agar para saksi dan korban bisa melaporkan dengan mudah di setiap provinsi yang ada di Indonesia," harapnya.

Komisi XIII sendiri menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban akan rampung dalam tiga bulan ke depan. Untuk itu, Komisi XIII membuka seluas-luasnya masukan dari masyarakat terkait perubahan dalam RUU yang sudah berumur 19 tahun tersebut.

**est,bia/mh**

# Derita Para Pemain Sirkus

**Dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi di Taman Safari Indonesia., Bogor, Ja Barat. Musibah ini menimpa para pemain sirkus yang tergabung dalam Oriental Circus Indonesia (OCI) yang biasa tampil di Taman Safari Indonesia (TSI).**

**P**ara pemain sirkus itu mendatangi Gedung DPR RI, menyampaikan derita panjang yang dialaminya selama menjadi pemain sirkus di TSI. Delegasi para mantan pemain OCI menemui Komisi XIII DPR RI yang membidangi HAM. Para pemain sirkus OCI tersebut banyak dihuni anak-anak. Dugaan eksploitasi terjadi sejak 1997. Para pemain sirkus ini juga pernah mengadu ke Komnas HAM. Komnas menyatakan, ada pelanggaran HAM terhadap anak-anak pemain sirkus yang dilakukan oleh OCI.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, menyatakan bahwa kasus dugaan eksploitasi

terhadap mantan pemain sirkus OCI yang tampil di TSI tergolong pelanggaran HAM berat. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat audiensi dengan para korban dan kuasa hukum pemain sirkus, akhir April lalu. Sugiat menegaskan bahwa kesimpulan itu diperkuat oleh hasil investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban, dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat. Ada beberapa pasal dalam UUD 1945 dan ketentuan hukum kita, bahkan hukum internasional (yang dilanggar). Ini pelanggaran berat," tandas Sugiat.

Sugiat menyoroti praktik perekrutan pemain sirkus yang dilakukan sejak usia sangat belia,

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.



FOTO: ANA/VEL



mulai dari dua hingga lima tahun. Menurutnya, praktik tersebut telah memasuki ranah pidana karena melibatkan transaksi jual beli anak. "Mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan. Si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orangtuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," tegas Sugiat.

Ia menambahkan, Komisi XIII DPR akan mengawal proses hukum serta pemulihan terhadap para korban dugaan eksploitasi tersebut agar mendapatkan keadilan.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain sirkus OCI menyampaikan kesaksian mengenai kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami sejak kecil, termasuk saat tampil di TSI. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan verbal sejak usia dini dalam lingkungan kerja yang tidak manusiawi.

Sementara di waktu terpisah, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyampaikan, pihaknya merekomendasikan Komnas HAM membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus OCI. Rekomendasi

“

**Dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern. Ada empat rekomendasi yang disampaikan KemHAM terkait persoalan tersebut.**

**Andreas Hugo Pareira**  
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI



FOTO: AHA/VEL



FOTO: AHA/VEL

Suasana pertemuan Komisi XIII Andreas Hugo Pareira (atas kanan) saat berbicara di hadapan deligasi eks karyawan OCI di Gedung Nusantara II.

pembentukan TGPF ini untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM terhadap mantan pemain sirkus OCI.

"Komisi XIII dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan eks pekerja OCI sudah mendengar aspirasi dan keluhan dari eks pekerja OCI ini. Untuk itu, untuk memverifikasi dan membuktikan terjadinya pelanggaran HAM dan kategori pelanggarannya. Komisi XIII memutuskan merekomendasikan kepada KemHAM/Komnas HAM untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta," kata Andreas saat dihubungi, Mei lalu.

Dia berharap pembentukan TGPF dapat memberi rasa keadilan bagi para korban. Soal dugaan pidana, Andreas menyampaikan harus menunggu hasil dari TGPF. "Sehingga, dengan demikian kasus ini menjadi tuntas dan memberi rasa keadilan bagi para eks pekerja OCI. Kita lihat hasil dari proses yang dilakukan oleh TGPF," imbuhnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain

OCI. KemenHAM menduga, ada pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan. Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan.

Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern. Ada empat rekomendasi yang disampaikan KemHAM terkait persoalan tersebut. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.  **tn**

مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين

18 NISAN 2025 / ISTANBUL



# Menyatukan Visi, Membela Palestina

**Forum diskusi kelompok parlemen negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina bertemu di Istanbul, Turki. Penyatuan visi untuk membela Palestina jadi kekuatan tersendiri.**

**K**etua DPR RI Puan Maharani menghadiri forum diskusi *The Group of Parliaments in Support of Palestine* yang dipimpin ketua parlemen Turki Numan Kurtulmuş, April silam. Parlemen negara-negara Islam pendukung Palestina hadir, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, dan

masih banyak negara pendukung lainnya.

"Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan," kata Puan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, April lalu.

Para delegasi parlemen ini sepakat untuk mendesak pemerintah masing-masing bertindak cepat mewujudkan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Ada banyak sesi diskusi pada forum yang dihadiri perwakilan pemerintah Palestina tersebut. Kelompok parlemen ini bertekad mengintegrasikan isu-isu penting ke dalam kerja majelis parlemen regional dan internasional. Selain itu, forum ini juga saling menghormati dan mendukung semua upaya yang dilakukan pemerintah masing-masing dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Kebetulan Aljazair menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Aljazair bisa memanfaatkan keanggotaannya untuk terus mendesak Dewan Keamanan PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida yang telah dilakukan zionis.





Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau *The Group of Parliaments in support of Palestine* di Istanbul, Turki, Jumat (18/4).

“Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Sudah saatnya kita mengambil langkah-langkah kolektif yang konkret yang secara langsung berkontribusi pada perjuangan rakyat Palestina,” seru Puan yang juga politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Kelompok Parlemen Bela Palestina pun mendukung Lembaga Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sebagai penstabil kawasan tersebut. Deklarasi bersama juga sepakat agar parlemen negara-negara pada kelompok ini memberikan dukungan politik, hukum, dan keuangan yang lebih besar kepada UNRWA.

Secara tegas, Kelompok Parlemen Bela Palestina menuntut Parlemen Israel menghormati hak-hak rakyat Palestina, serta mencabut semua undang-undang dan inisiatif legislatif yang tidak sesuai dengan hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional. Termasuk menghentikan semua pekerjaan legislatif dalam poin-poin yang sama.

Kelompok Parlemen juga menuntut Israel mengakhiri semua serangan di Tepi Barat, termasuk

Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Mereka juga mengutuk keras agresi militer Israel terhadap penduduk sipil dan blokade bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan mendesak Israel untuk mengakhiri operasi militernya, menarik pasukannya, dan memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah jalur

## Seruan kepada PBB

Kepada PBB, Kelompok Parlemen Bela Palestina menyerukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan dengan sepenuhnya, efektif dan segera melaksanakan semua resolusi PBB yang relevan dan mengambil tindakan tambahan yang diperlukan, khususnya Dewan Keamanan PBB.

Seruan untuk PBB itu termasuk mengenakan sanksi terhadap kegiatan ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki seperti aneksasi, kegiatan permukiman, pembongkaran rumah-rumah Palestina, perampasan tanah, dan kekerasan terhadap warga sipil. Forum yang dipimpin Ketua Parlemen Turki, itu juga memutuskan membentuk Kelompok Parlemen Bela Palestina dengan menggunakan pengaruh politik melalui saluran yang tepat guna membela, melindungi, dan memastikan hak-hak dasar warga Palestina.

“Saya sepenuhnya mendukung usulan yang diajukan oleh Parlemen Turki untuk mempertahankan kelompok ini sebagai forum informal, tanpa perlu Sekretariat formal,” ungkap Puan. “Struktur ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, dan menanggapi dengan cepat perkembangan di lapangan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Kelompok Parlemen Bela Palestina menegaskan, menyambut baik rencana pemulihan dan rekonstruksi awal Jalur Gaza yang diajukan oleh Republik Arab Mesir, yang juga diadopsi oleh Liga Negara-negara Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam. Kelompok Parlemen Bela Palestina mendukung hak Negara Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB dan organ-organnya, serta menyerukan kepada semua negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya.

hal/mh



# Samuel Wattimena

## Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sofund

**Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Samuel J.D. Wattimena, menggelar kegiatan reses masa sidang I tahun persidangan 2024-2025 di balai kelurahan Muktiharjo kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pejabat setempat, Jumat (21/3/2025) lalu.**

**D**alam pertemuan tersebut, Samuel menekankan pentingnya mendengar langsung aspirasi warga terkait sejumlah isu, di antaranya

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan pariwisata lokal, penyiaran melalui RRI, hingga implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kami di Komisi VII akan terus mendorong program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama UMKM dan sektor pariwisata. Ini sesuai dengan visi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan," ungkap Samuel. Salah satu topik inovasi yang dibahas dalam reses ini adalah peluncuran aplikasi berbasis mobile bernama Sofund, yang kini sudah tersedia di Play Store.

Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi terobosan untuk memfasilitasi komunikasi dan penyebaran informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah Semarang. "Sofund ini adalah langkah maju. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka, sekaligus memperoleh informasi terbaru tentang program-program pemerintah," jelas Samuel.

Sementara itu, Ketua LPMK Moh. Muslim mengatakan, keberadaan aplikasi seperti Sofund bisa menjadi solusi atas tantangan komunikasi selama ini. "Dengan teknologi ini, keterhubungan antara warga dan pemangku kebijakan akan lebih efektif," katanya.  **tf/mh**





# Zigo Rolanda

## Apresiasi Kunjungan Menteri PU ke Sumbar

**Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Provinsi Sumatra Barat pada 2–4 Mei 2025 lalu. Menurutny, kunjungan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.**

“Sebagai mitra kerja Kementerian PU, kami menyambut positif kehadiran Menteri Dody di Sumatra Barat. Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan program-program infrastruktur berjalan sesuai target yang telah direncanakan,” kata Zigo, legislator dari daerah pemilihan Sumatra Barat I.

Zigo menjelaskan, kunjungan Menteri PU ini menjadi kesempatan



Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda melihat langsung progres infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas dan ekonomi antarwilayah di Sumbar.

untuk melihat langsung progres dan kebutuhan dari sejumlah proyek strategis di Sumbar. Beberapa di antaranya yakni Fly Over Sitinjau Lauik, Sabo Dam Batang Malana di Kabupaten Tanah Datar, jalan Batusangkar–Guguak Cino–Sitangkai, serta jalan Aie Dingin di Kabupaten Solok.

Ia menyoroti pentingnya pembangunan jalan Aie Dingin sebagai penghubung antarwilayah dan antardaerah di dua provinsi. “Jalan Aia Dingin di Kabupaten Solok merupakan salah satu ruas jalan nasional yang memiliki peran

strategis sebagai penghubung antara Kota Padang dengan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatra Barat, serta menghubungkan wilayah tersebut dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi,” jelas Zigo.

Jalan ini menjadi jalur vital bagi arus transportasi orang, barang, dan hasil pertanian antarprovinsi, sehingga keberadaannya sangat penting untuk mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.  rdn/mh

# Heri Gunawan Hadiri Peluncuran Pemuda Pelopor Desa

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan menghadiri peluncuran program Pemuda Pelopor Desa di Sukabumi, Jawa Barat. Program ini untuk mendorong para pemuda desa menjadi penggerak ekonomi dan inovasi bagi desanya.

**P**eluncuran program ini semakin meriah, karena dihadiri langsung oleh Mendes PDTT Yandri Susanto, Wamendes PDTT Riza Patria, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Acara ini digelar di Desa Nagrak Utara, Kabupaten Sukabumi, akhir tahun lalu.

"Apresiasi atas kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Mendes PDTT dan Utusan Khusus Presiden Prabowo bidang pemuda dan seni," ucap Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Menambahkan, "ini sebuah langkah baik, langkah yang perlu diapresiasi, di mana kementerian dan utusan presiden mendukung Pemuda Pelopor Desa ini."

“

Apresiasi atas kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Mendes PDTT dan Utusan Khusus Presiden Prabowo bidang pemuda dan seni

Peluncuran program ini, harap legislator dapil Jabar IV ini, bisa menumbuhkan BUMDes dan UMKM setempat untuk menopang ekonomi desa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

— rnm/mh



Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan saat menghadiri peluncuran program Pemuda Pelopor Desa di Sukabumi, Jawa Barat.



## Irsan Sosiawan Gading

# Berikan Beasiswa untuk Anak Muda Aceh

**Dalam upaya mendukung kemajuan pendidikan di Aceh, Anggota DPR RI Irsan Sosiawan Gading memberikan beasiswa penuh kepada 30 pemuda-pemudi Aceh untuk menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Beasiswa ini diberikan secara pribadi oleh Irsan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masa depan generasi muda Aceh.**

“Penerima beasiswa tidak hanya berasal dari kalangan siswa-siswi berprestasi, tetapi juga dari keluarga kurang mampu,” ujarnya baru-baru ini. Anggota Komisi XII DPR itu berharap, melalui beasiswa mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. “Pendidikan merupakan kunci utama membawa Aceh menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera,” tuturnya.

Ia percaya bahwa anak-anak Aceh memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Namun, tanpa pendidikan yang layak, kesempatan itu bisa hilang begitu saja. “Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa setidaknya 30 anak muda Aceh dapat terus belajar dan mengembangkan diri mereka,” ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa selama masa pendidikan di SMA, para penerima beasiswa diharapkan menemukan minat dan meraih prestasi yang akan membuka jalan menuju perguruan tinggi. “Generasi muda Aceh diharapkan dapat menjadi pilar pembangunan

daerah di berbagai sektor melalui pendidikan yang baik,” harapnya.

Program beasiswa ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama para orangtua dan siswa penerima manfaat. Salah seorang penerima

beasiswa, Akrimy Maswa, siswi asal Dusun Teungoh Blang Poroh, Jeunieb, Bireuen, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya untuk bisa meraih cita-cita tanpa harus khawatir dengan biaya pendidikan. **rmm/mh**



Anggota DPR RI Irsan Sosiawan Gading saat memberikan beasiswa penuh pada 30 anak muda Aceh.

Rico Alviano

# Menjemput Aspirasi, Merawat Harapan Sumatera Barat

**Suasana hangat menyelimuti Jorong Sepanjang, Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, ketika sosok yang dinanti warga kembali hadir di tengah mereka.**

**D**i tengah semarak junjungan daerah pemilihan (Kundapil), Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano menapakkan langkah penuh makna, seraya menyapa masyarakat bukan hanya sebagai politisi, tetapi sebagai anak daerah yang pulang membawa harapan.

Bukan sekadar seremonial politik, Rico datang untuk mendengar,

menyerap denyut aspirasi warga, dan memberikan bantuan nyata. Sejumlah elemen masyarakat hadir mulai dari ketua RW, tokoh agama, hingga para pemuda. Mereka bukan sekadar audiens, melainkan mitra dialog dalam panggung demokrasi yang hidup bagi Rico.

"Ini bukan sekadar kunjungan kerja. Ini bentuk ikhtiar saya menjaga silaturahmi dan merespons langsung apa yang menjadi keresahan warga.

Sebagai wakil dari Sumbar I, saya berkomitmen untuk terus hadir, mendengar, dan bertindak" ungkap Rico di sela-sela agenda kundapil.

Ucapannya ini bukan isapan jempol. Dalam kesempatan itu, ia langsung menyalurkan bantuan sembako kepada warga dan merespons berbagai keluhan masyarakat—mulai dari kebutuhan lampu penerangan jalan hingga keresahan soal dampak sosial-ekonomi dari aktivitas PT Semen Padang terhadap pelaku UMKM sekitar.

Harri Novaliza, tokoh pemuda Gang Sepanjang, menyambut kehadiran Rico dengan penuh apresiasi. Selama pertemuan berlangsung, Harri menyuarkan isu-isu kritis, termasuk tantangan yang dihadapi UMKM dan permasalahan lingkungan yang kian mendesak.

"Kehadiran beliau adalah cahaya bagi warga. Bukan hanya karena posisinya di DPR, tetapi karena ia benar-benar kembali dan mendengar kami," katanya.

Ketua RW setempat pun menyoroti pentingnya penerangan jalan di sekitar Musholla Al-Muttaqin, yang minim cahaya dan rawan disalahgunakan oleh generasi muda. Isu-isu ini ditanggapi serius oleh Rico, yang menjanjikan langkah-langkah konkret, bukan janji kosong.

um/mh



Anggota DPR RI Rico Alviano hadir di Jorong Sepanjang, Sumatera Barat, untuk mendengar aspirasi warga, serta memberikan bantuan sembako.



# Tutik Kusuma Wardhani

## Sosialisasi Keamanan Pangan di Bali



Anggota DPR RI Tutik Kusuma Wardhani sosialisasikan UU No. 18/2012 tentang keamanan pangan kepada mahasiswa STIKes Buleleng di Bali.

**Dalam upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bermutu, Anggota F-Demokrat DPR RI Tutik Kusuma Wardhani melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Keamanan Pangan kepada mahasiswa STIKes Buleleng, Bali**

**L**egislator Dapil Bali ini, menyampaikan bahwa keamanan pangan merupakan kondisi penting yang harus dipenuhi guna mencegah cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat.

Sosialisasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kesadaran mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan terhadap urgensi keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan upaya preventif melalui kegiatan promosi maupun penyuluhan

mengenai keamanan pangan pada masyarakat.

Pemanfaatan lahan yang baik juga jadi perhatian yang meliputi pembuatan pupuk alami, inovasi pemeliharaan perkebunan yang terhindar dari bahan kimia yang berbahaya. Kegiatan sosialisasi ini bukan hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa STIKes Buleleng untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi sehat yang dimulai dari lingkungan kampus.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang keamanan pangan dan peran penting mereka sebagai calon tenaga kesehatan, diharapkan lahir kontribusi nyata dalam menjaga kesehatan masyarakat secara lebih luas.

 bia/mh

# Abdul Fikri Faqih Bantu Korban Longsor di Brebes

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, didampingi Direktur Infrastruktur Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Yufferyzal dan Plt Kepala Pelaksana BPBD Brebes Supriyadi, turun langsung meninjau lokasi terdampak longsor, akhir April silam.



Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih bersama BNPB turun ke lokasi longsor di Brebes untuk menyerahkan bantuan dan mendengar langsung keluhan warga terdampak.

lokasi, Fikri mengaku sangat prihatin melihat musibah yang menimpa ratusan warga di empat pedukuhan di kawasan Desa Mendala. Saat kunjungannya, data yang dihimpun menunjukkan 123 KK terdampak, 114 rumah rusak, dan 383 jiwa terpaksa mengungsi. "Kondisinya tentu dinamis karena tanah masih bergerak," ujar Fikri, menyampaikan data tersebut. Sebagai wujud kepedulian nyata, Fikri bersama rombongan juga menyerahkan bantuan darurat dari BNPB untuk meringankan beban berat para korban. "Kita menyerahkan bantuan 200 paket sembako, 50 hygiene kits, dan 200 matras," jelasnya.

Fikri mengatakan distribusi bantuan vital ini diatur langsung oleh kepala desa dan kepala posko, memastikan kebutuhan konsumsi harian pengungsi tetap terpenuhi hingga saat ini. Dalam kesempatan berinteraksi langsung di posko pengungsian, Fikri mendengarkan aspirasi dan keluhan warga serta petugas di lapangan, mulai dari tim kesehatan hingga relawan dapur umum. Ia mencatat beberapa kebutuhan mendesak yang perlu segera diatasi.

"Secara umum tak banyak kendala berarti. Hanya dapur umum masih agak telat [pasokan] tabung gas, yang rata-rata [butuh] 6 per hari, masih kurang 1 atau 2 tabung. Mudah-mudahan Ibu Bupati segera mengusahakannya," harap Fikri.

 we/mh

Kunjungan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dilakukan di berbagai titik. Diantaranya menyisir titik-titik pergerakan tanah, mendatangi posko pengungsian di lapangan futsal Desa Mendala, serta meninjau langsung kondisi dapur umum dan posko kesehatan yang didirikan untuk melayani para penyintas.

Dari hasil peninjauan dan dialog di





Ahmad Yohan

# Salurkan Bantuan Pertanian di Kupang

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, menyalurkan berbagai bantuan pertanian kepada kelompok tani di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, NTT, akhir April silam. Bantuan ini meliputi motor air, bibit jagung, peralatan pertanian, serta bibit ikan air tawar yang disebar langsung di tambak pertanian milik kelompok Taruna Tani Simple Man.**

Penyaluran bantuan dilakukan untuk mendukung musim tanam kedua sekaligus sebagai bagian dari program nasional menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Kupang Yosef Lede, Kapolres Kupang AKBP Rudy Junus Ledo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang Amin Juriah, Camat Fatuleu Hendra Mooy, serta tiga anggota DPRD Kabupaten Kupang dari PAN:

Linden Sanam, Dominggus Atimeta, dan Rudin Amtiran.

Yohan menegaskan bahwa NTT kini menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan pangan nasional. Hal ini berkat komunikasi aktif para kepala daerah di NTT dengan pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa bantuan dari pemerintah pusat akan terus mengalir, mencakup alat, bibit, dan pupuk, guna memperkuat kapasitas petani dalam memproduksi pangan secara mandiri.

"Akan saya maksimalkan untuk mendukung para petani, peternak, dan nelayan di seluruh NTT, bukan hanya di dapil saya di dapil I, tapi diseluruh NTT, sehingga NTT bisa berkontribusi pada swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo. Irigasi yang bagus, teknologi dan alat pertanian yang modern, bibit yang cukup diharapkan akan mendorong semangat petani untuk bekerja dan memaksimalkan usaha pertanian mereka," ujar Yohan.

Bupati Kupang Yosef Lede, menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Yohan atas perhatiannya terhadap sektor pertanian di Kupang. Ia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh kelompok tani demi mendukung ketahanan pangan lokal. we/mh



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan saat menyalurkan bantuan pertanian kepada kelompok tani di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

# Menuju Kantor Berita

**Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI, sedang menyiapkan diri membentuk Kantor Berita Parlemen. Usaha merancang menuju pembentukan kantor berita tersebut sudah lama dilakukan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk beroperasi.**

**B**iro Pemberitaan Parlemen telah mengunjungi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk melihat dari dekat operasional sebuah kantor berita. Antara bisa menjadi pembanding yang ideal bagi Biro Pemberitaan Parlemen bila ingin membangun kantor berita.

Seperti kantor berita lain, LKBN Antara juga menghadapi disrupsi yang menuntut inovasi baru dalam memproduksi berita di era digital. Biro Pemberitaan Parlemen mempelajari semua yang dihadapi LKBN Antara itu. Pembelajaran tersebut, tidak hanya soal pengemasan berita, melainkan juga bagaimana setiap informasi bisa tersampaikan dengan

baik dalam bentuk berita tertulis, fotografi, dan video.

"Ini yang kami juga terus banyak belajar dari Antara, sehingga apa yang kami peroleh dari Antara ini, harapan kami bisa diterapkan juga di Biro Pemberitaan Parlemen, dan benar-benar nanti ke depan bisa menjadi kantor berita parlemen," ujar Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi di sela-sela kunjungan ke LKBN Antara di Jakarta Pusat, April lalu.

Indra menekankan bahwa setiap produk berita yang dihasilkan Biro Pemberitaan Parlemen mengusung tagline jurnalisme positif, yang tugas utamanya mengabarkan kepada masyarakat tentang kerja-kerja DPR dalam semua platform yang dimiliki, baik televisi, radio, media cetak,



FOTO: JKA/VEL





FOTO: JKA/VEL

follower-nya, termasuk juga frekuensi postingan yang tinggi.

"Kami punya banyak media sosial, yang resmi itu ada YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ada X, ada Thread, itu kita optimalkan setinggi-tingginya, termasuk juga yang dimiliki oleh TVR Parlemen. Jadi kami sampaikan dengan cara kekinian tentu, apa saja sikap anggota dan DPR secara kelembagaan terhadap suatu isu di masyarakat, dan juga pembahasan-pembahasan, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi LBKN Antara Jaka Sugiyanta mengungkapkan selama ini hubungan Biro Pemberitaan DPR RI telah berjalan dengan baik.

"Ke depan kolaborasi antarkedua institusi ini harus terus ditingkatkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kunjungan Biro Pemberitaan ini menjadi momentum untuk menjaga komunikasi publik lebih baik lagi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat," kata Jaka. **rdn/mh**

website, serta media sosial.

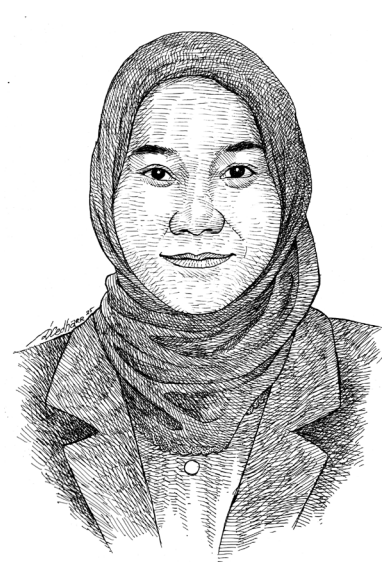
"Kami terus mengemas informasi, baik yang terjadi di gedung DPR maupun di luar gedung DPR, yang dikerjakan dan dilakukan oleh anggota DPR secara perorangan, maupun juga alatengkapan DPR, baik pimpinan DPR maupun komisi dan badan-badan yang ada di DPR. Tentu ini juga kita lengkapi dengan respons dari DPR terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat, yang menyakut hajat hidup orang banyak. Sehingga, masyarakat tahu bagaimana sikap DPR, terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat," jelasnya, panjang lebar.

Selain itu, Indra menekankan sejauh ini engagement media sosial DPR RI terhadap publik sangatlah tinggi. Bukan hanya subscriber atau



FOTO: JKA/VEL

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi saat melihat dari dekat kantor Berita Antara.



Oleh:  
**dr. Wahidatur Rohmah**

# ***The Silent Killer*** **Hipertensi**

**Tahukah Anda 1 dari 3 Orang di Indonesia menderita tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi atau yang dikenal dengan hipertensi menjadi salah satu gerbang masuknya berbagai penyakit termasuk penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan permasalahan kesehatan lainnya. Penyakit ini umumnya tidak selalu bergejala, sehingga disebut “The Silent Killer”.**

## **Penyebab Hipertensi**

Hipertensi merupakan kondisi saat tekanan darah lebih dari normal. Seseorang dapat dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah sistolik (angka di atas) lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan diastolik (angka di bawah) lebih dari atau sama dengan 90 mmHg, pada pemeriksaan berulang (contohnya, 140/90 mmHg).

Hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Lebih dari 90% hipertensi yang ada di dunia adalah hipertensi primer yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Sedangkan hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, hormon, dan kondisi kehamilan.

## **Faktor Risiko Hipertensi**

Faktor risiko hipertensi dibagi menjadi dua, yakni faktor yang dapat diubah, antara lain: diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik (gaya hidup sedenter), stres, merokok, minum alkohol, dan obesitas. Faktor yang tidak dapat diubah, antara lain:

Keturunan atau faktor genetik, usia lebih dari 65 tahun, dan memiliki penyakit seperti diabetes dan penyakit ginjal.

## **Apa Gejala Hipertensi?**

Sebagian besar orang tidak mengalami gejala apa pun saat tekanan darahnya tinggi. Tekanan darah sangat tinggi (biasanya 180/120 mmHg atau lebih) dapat mengalami gejala berikut: nyeri kepala hebat, nyeri dada, pusing berputar, sesak napas, mual, muntah, pandangan kabur/buram, telinga berdenging, mimisan, kebingungan (penurunan kesadaran), kecemasan, dan irama jantung tidak teratur

## **Diagnosis Hipertensi**

Penegakkan diagnosis hipertensi dilakukan di klinik atau rumah sakit oleh seorang dokter. Pengukuran tekanan darah baiknya dilakukan 1-2 tahun sekali bagi Anda yang berusia di bawah 40 tahun. Bagi Anda yang berusia lebih dari 40 tahun, pengukuran wajib dilakukan setiap tahun. Bagi penderita hipertensi, frekuensi pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai petunjuk dokter.

Berikut kiat dalam mengukur tekanan darah menurut *American Heart Association*.

Pemeriksaan lain yang juga dibutuhkan, yakni pemeriksaan laboratorium (fungsi hati, ginjal, kolesterol, dan tiroid), kelastrikan jantung (elektrokardiogram/ EKG), dan ekokardiogram (“USG jantung” untuk melihat jantung lebih rinci).

## **Komplikasi Hipertensi**

Kerusakan akibat tekanan darah tinggi terjadi seiring waktu. Apabila tidak terdeteksi dan terkontrol, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan: serangan jantung, stroke, gagal jantung, penyakit ginjal atau gagal ginjal, kehilangan penglihatan (penyakit retina), disfungsi seksual, dan aterosklerosis (penumpukan plak di pembuluh darah).

## **Pengobatan Hipertensi**

Target utama pengobatan hipertensi adalah untuk mengendalikan tekanan darah dalam batas normal. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan terapi obat dari dokter dan menjaga pola hidup





sehat. Mengingat sebagian besar penderita hipertensi mengalami hipertensi primer yang penyebabnya belum diketahui pasti, maka terapi obat biasanya dilakukan dalam jangka waktu lama atau seumur hidup. Konsumsi obat teratur dan sesuai jadwal agar terhindar dari komplikasi.

Berikut hal yang dapat membantu menurunkan tekanan darah selain obat;

- Menjaga berat badan ideal dan olahraga
- Penurunan berat badan 5 kg dapat menurunkan tekanan darah hingga 4 mmHg.
- Olahraga teratur selama 30–60 menit/hari, minimal 3 hari/

**Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan: serangan jantung, stroke, gagal jantung, penyakit ginjal atau gagal ginjal,**

- minggu dapat menurunkan tekanan darah hingga 8 mmHg.
- Mengurangi asupan garam. Asupan garam dapur dianjurkan tidak melebihi 5 gr/hari atau setara dengan 1 sendok teh garam dapur.

- Hindari makanan cepat saji dan makanan kaleng, termasuk saus berlabel garam (natrium) atau natrium glutamate.
- Menerapkan pola makan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur karena mengandung mineral kalium yang baik untuk menyeimbangkan tekanan darah.
- Mengurangi konsumsi alkohol dan berhenti merokok (termasuk rokok tembakau, elektrik/vape, dan shisha). Konsumsi alkohol dan merokok merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan pembuluh darah..

# Menyapa Manado

## *Menyerap Rasa dan Alam*

**Tak semua kota pantai mampu menawarkan harmoni antara laut yang sibuk, alam yang agung, dan kuliner yang menggugah. Tapi Manado melakukannya dengan santai. Seolah semua keindahan itu memang seharusnya ada di sini sedari awal.**

**K**ota metropolis yang bertengger di ujung utara Pulau Sulawesi ini tetap saja menarik untuk dijelajahi. Baik dengan langkah pertama maupun kunjungan kesekian. Pagi hari di Manado, sarapan yang nyaris tak tergantikan adalah nasi kuning cakalang dengan

sambal roa. Disajikan hangat, nasi kuning ini kadang dibungkus daun woka, sejenis palem endemik yang banyak tumbuh di Indonesia timur. Aromanya wangi, berpadu dengan rasa gurih dan pedas yang membangunkan seluruh indera.

Bila dibandingkan dengan nasi kuning Gorontalo, versi Manado

terasa lebih berempah. Ada aroma cengkih, daun pandan, dan pala samar-samar menyelusup ke nasi. Cakalang suwir jadi lauk utama, ditambah sambal roa, olahan ikan endemik Sulawesi yang diasap lalu diulek dengan cabai rawit. Saya merasakan jejak akulturasi dalam seporci nasi ini: budaya agraris lewat







Danau Linow



Pantai di Kota Manado

nasi gurih dan kebudayaan maritim dari hasil laut yang disajikan.

Setelah sarapan, saya berjalan menyusuri kawasan pelabuhan Manado. Dari atas Jembatan Soekarno, yang menghubungkan dua sisi kota yang dipisahkan Sungai Tondano, tampak aktivitas pelabuhan: kapal bersandar, peti kemas diturunkan, dan pekerja sibuk dengan tugas mereka. Di kejauhan, garis laut yang biru pekat membingkai Pulau Bunaken dan siluet Gunung Manado Tua, sebuah gunung api tua yang menjulang dari tengah laut.

Sungai Tondano mengalir deras di bawah jembatan, membawa air dari Danau Tondano yang terletak di pegunungan Minahasa. Danau itu jugalah yang menjadi tujuan saya selanjutnya. Sekitar satu jam perjalanan dari pusat kota, Danau Linouw menyambut dengan permukaan air yang bisa berubah warna—kadang biru, kadang hijau, kadang kecokelatan, tergantung pantulan cahaya dan kandungan mineral.

Danau Linouw adalah danau vulkanik, dengan uap belerang yang sesekali tercium menusuk hidung. Tapi justru itu yang membuatnya unik. Di tepi danau, ada beberapa kafe dan gardu pandang. Saya memesan gorengan pisang gogoroho, jenis pisang lokal yang lebih sering disantap saat masih mengkal, dicocol dengan sambal roa. Rasanya unik: padat seperti sukun, berpati, sedikit



Bubur Tinutuan

asam, lalu disapu rasa pedas dan asap dari sambal roa. Di banyak rumah tangga Minahasa, pisang ini kadang menggantikan nasi.

Menjelang sore, hujan deras mengguyur kota. Manado memang kerap dilanda hujan tiba-tiba, dan tak jarang memicu banjir akibat luapan sungai. Pemerintah kota kini sedang membangun tanggul dan memperkuat sistem drainase. Satu hal yang saya sadari, warga Manado tetap menjalani hari-harinya dengan tenang, seolah paham betul bagaimana hidup berdamai dengan alam.

Saya kembali ke pusat kota dan memesan bubur Manado untuk santap sore. Meski disebut bubur, isinya padat: nasi, jagung, labu kuning, daun gedi, singkong, dan kangkung yang ukurannya mengejutkan besar, jauh dari ukuran kangkung yang biasa saya temui di Jawa. Bubur ini tak sekadar mengenyangkan, tapi juga menghangatkan, seolah memeluk dari dalam.

Saya memilih topping cakalang



Nasi kuning manado

suwir lagi, karena rasanya sulit dilupakan. Beberapa warung menyediakan alternatif tetelan sapi, tetapi bagi saya, Manado seakan memang diciptakan untuk menyatu dengan lautnya—bahkan sampai ke semangkuk bubur.

Manado bukan sekadar kota tujuan, melainkan pengalaman multisensori. Ia adalah suara ombak, aroma belerang dan asap ikan, tekstur kangkung dan pisang gogoroho, serta keramahan warga yang tak dibuat-buat. Setiap kunjungan ke sini adalah undangan untuk lebih dekat dengan Indonesia bagian timur yang kaya dan tulus menyambut.

Pergi ke Manado bukan hanya menyenangkan. Ia menyadarkan kita bahwa ada sisi lain dari negeri ini yang begitu memesona, menyejukkan, dan tak kalah membanggakan. **aha/mh**



# ENAM TUNTUTAN DI HARI BURUH



SELAMAT HARI BURUH INTERNASIONAL

1 MEI 1886 - 1 MEI 2025

1. Segera untuk mencabut Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan segera Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.  
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024.  
3. Ulangi Upah Layak Nasional.

4. Segera untuk Saingan PHK.  
5. Segera untuk Saingan PHK.  
6. Segera untuk Saingan PHK.  
7. Segera untuk Saingan PHK.  
8. Segera untuk Saingan PHK.

9. Segera untuk Saingan PHK.  
10. Segera untuk Saingan PHK.  
11. Segera untuk Saingan PHK.  
12. Segera untuk Saingan PHK.  
13. Segera untuk Saingan PHK.





**Langit biru memayungi lapangan Monumen Nasional (Monas) saat ratusan ribu buruh tumpah ruah memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Beragam bendera serikat pekerja berkibar menambah kesemarakan peringatan hari buruh yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.**

“Selamat Hari Buruh Internasional 2025 untuk semua buruh maupun pekerja di Indonesia. Momen May Day menjadi bukti bahwa perjuangan untuk kesejahteraan buruh tak pernah berhenti sejak negara ini berdiri,” kata Puan di Monas, Jakarta, Kamis (1/5) lalu.

Lewat spanduk, para buruh menyerukan bahwa perjuangan buruh tak boleh berhenti hingga tercipta keadilan kerja yang sejati dan kesejahteraan yang merata untuk seluruh pekerja di Indonesia. Setidaknya ada enam tuntutan buruh yang mengemuka:

1. Hapus Sistem Outsourcing
2. Bentuk Satgas PHK
3. Wujudkan Upah Layak
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan
5. Sahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)
6. Sahkan RUU Perampasan Aset dan Berantas Korupsi.

Sejumlah elemen buruh dan masyarakat juga melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada May Day. Persoalan buruh berkutat dari masalah upah, status kerja yang tak pasti, dan beragam bentuk pelanggaran hak-hak buruh seperti penahanan ijazah buruh oleh pemberi kerja.

Di sudut lain, para pekerja media (jurnalis) tertangkap kamera Parlementaria tengah sibuk melakukan pekerjaan memburu narasumbernya di kompleks parlemen Senayan. Parlementaria juga merekam suasana kerja para buruh di salah satu pabrik pembuatan sepatu di daerah Jawa Barat dan petugas kebersihan bandara yang tengah membersihkan kaca garbarata di terminal III Bandara Soekarno Hatta

“Saya percaya di balik setiap peluh buruh, ada semangat perjuangan untuk membangun bangsa ini,” tandas Puan Maharani, cucu Presiden Soekarno itu.



Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (duduk di belakang) mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).







FOTO: DEP/VEL

Suasana peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas Jakarta.



FOTO: OLI/VEL

Para pekerja Media (Jurnalis) tengah melakukan pekerjaan memburu narasumbernya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.







Petugas kebersihan bandara tengah membersihkan kaca garbarata, di Badnara Soekarno Hatta Terminal III Ultimate Jumat, (25/04/2025), Pembersihan dilakukan dalam menjaga kebersihan di lingkungan bandara.

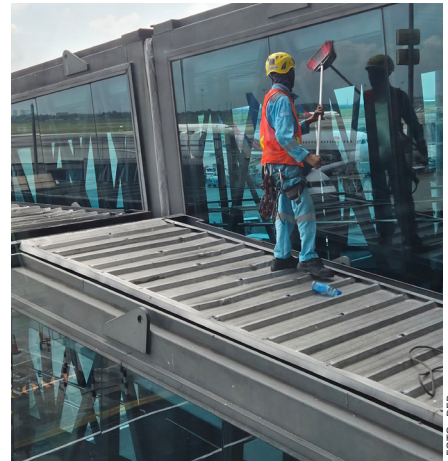


FOTO: DEP



FOTO: RUMI/VEL



FOTO: JAKHAN/VEL



Sejumlah Buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Kamis, (01/05/2025) Aksi tersebut dalam rangka hari buruh MayDay.





SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN :

# Selamat Hari Raya WAISAK



DPR RI



DPR RI



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri